

**IMAJINASI MASYARAKAT DAN PEROLEHAN SUARA  
PARLOK PADA PEMILU DPRK ACEH JAYA 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MONA HESTIKA**  
**NIM. 160801046**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mona Hestika  
NIM : 160801046  
Program Studi : Ilmu Politik  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Xang menyatakan,



  
Mona Hestika  
NIM. 160801046

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

**“Imajinasi Masyarakat dan Perolehan Suara Parlok pada Pemilu  
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya 2019”**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MONA HESTIKA  
NIM. 160801046

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Eka Januar M.Soc.Sc.  
NIP. 198407012015031003

Pembimbing II

Rizkika Lhena Darwin, M.A  
NIP. 198812072018032001

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Mona Hestika  
NIM. 160801046

Padahari / Tanggal  
Selasa : 28 Juli 2020  
07 Zulhijjah 1441

Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

  
Eka Januar, M. Soc. Sc  
NIP.198401012015031003

Sekretaris

  
Rizkika Lhena Darwin, MA  
NIP. 198812072018032001

Penguji I

  
Dr. Reza Idria, MA  
NIP. 198103162011011003

Penguji II

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc  
NIDN. 2008048903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



  
Dr. Erpita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Nama : Mona Hestika  
NIM : 160801046  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan  
Judul : Imajinasi Masyarakat dan Perolehan Suara Parlok pada Pemilu DPRK Aceh Jaya 2019  
Tanggal Sidang : 28 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 73 Halaman  
Pembimbing I : Eka Januar, M. Soc.sc  
Pembimbing II : Rizkika Lhena Darwin, MA  
**Kata Kunci : *Memori Kolektif, Partai Lokal, Pemilu Legislatif 2019***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keunggulan perolehan suara partai lokal di DPRK Aceh Jaya pada pemilu legislatif 2019. Penelitian ini ingin melihat bagaimana memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terkait konflik bersenjata antara GAM vs RI dan pengaruh memori kolektif terhadap perolehan suara parlok. Sehingga partai lokal dapat meraih 12 kursi dari total 20 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan teori memori kolektif, memori kolektif dalam penelitian ini difokuskan kepada ingatan kolektif masyarakat Aceh Jaya terkait konflik GAM dan RI. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah dianalisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *pertama*, masyarakat memiliki memori kolektif pada masa konflik GAM dan RI. *Kedua*, masyarakat enggan dalam melibatkan konflik di masalah dengan pilihannya terhadap partai lokal pada pemilu legislatif 2019. Lebih memfokuskan terhadap pemimpin yang bisa membawa kemajuan untuk Aceh Jaya ketimbang harus mengingat konflik tersebut. Perilaku memilih masyarakat mengarah kepada pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pendekatan psikologis yang dimaksud ialah pendekatan psikologis terhadap personal calon legislatif bukan terhadap partai. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah terdapat memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terkait konflik tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara partai lokal Sehingga perolehan suara parlok lebih dipengaruhi oleh figur calon legislatif. Penilaian masyarakat terhadap personal calon legislatif tersebut dapat berpengaruh terhadap perolehan suara partai lokal di Aceh Jaya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Imajinasi Masyarakat dan Perolehan Suara Parlok pada Pemilu DPRK Aceh Jaya 2019”. Skripsi ini penulis ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari ada begitu banyak kekurangan didalam skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan kritikan serta saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Kedua orangtua beserta keluarga besar yang telah memberikan Do'a dan Support baik secara materil maupun inmateril sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA, selaku Rektor Uin AR-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik UIN AR-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Ramzi Murziqin, M.A, selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik.
7. Bapak Eka Januar,, M.Soc,Sc selaku pembimbing I dan Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc selaku penguji II dan Bapak Dr. Reza Idria, MA selaku penguji I yang sudah sangat membantu memberikan saran dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Senior Juanda Erisman A.Md, Asrol Vani S.IP, Dwi Ayu Wandira S.IP dan senior ilmu politik lainnya yang telah meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat saya Naili Rahma Sari dan teman-teman Family S.IP yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu: Nyanyak Marawan Putri, Nur Amelia, Elizawati, Teguh Ranggalayoni dan teman-teman lainnya. Beserta sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta doa untuk saya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020  
Penulis,

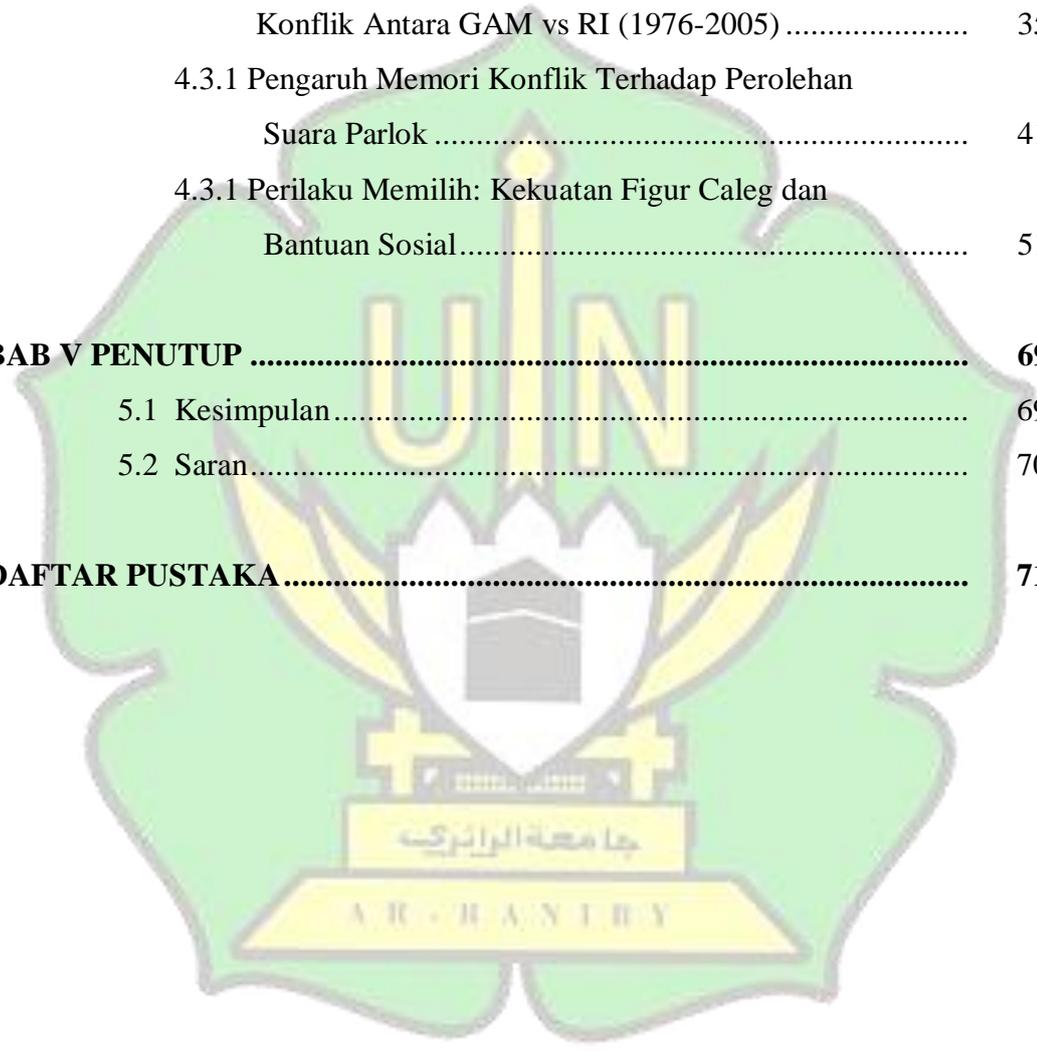


Mona Hestika  
NIM. 160801046

## DAFTAR ISI

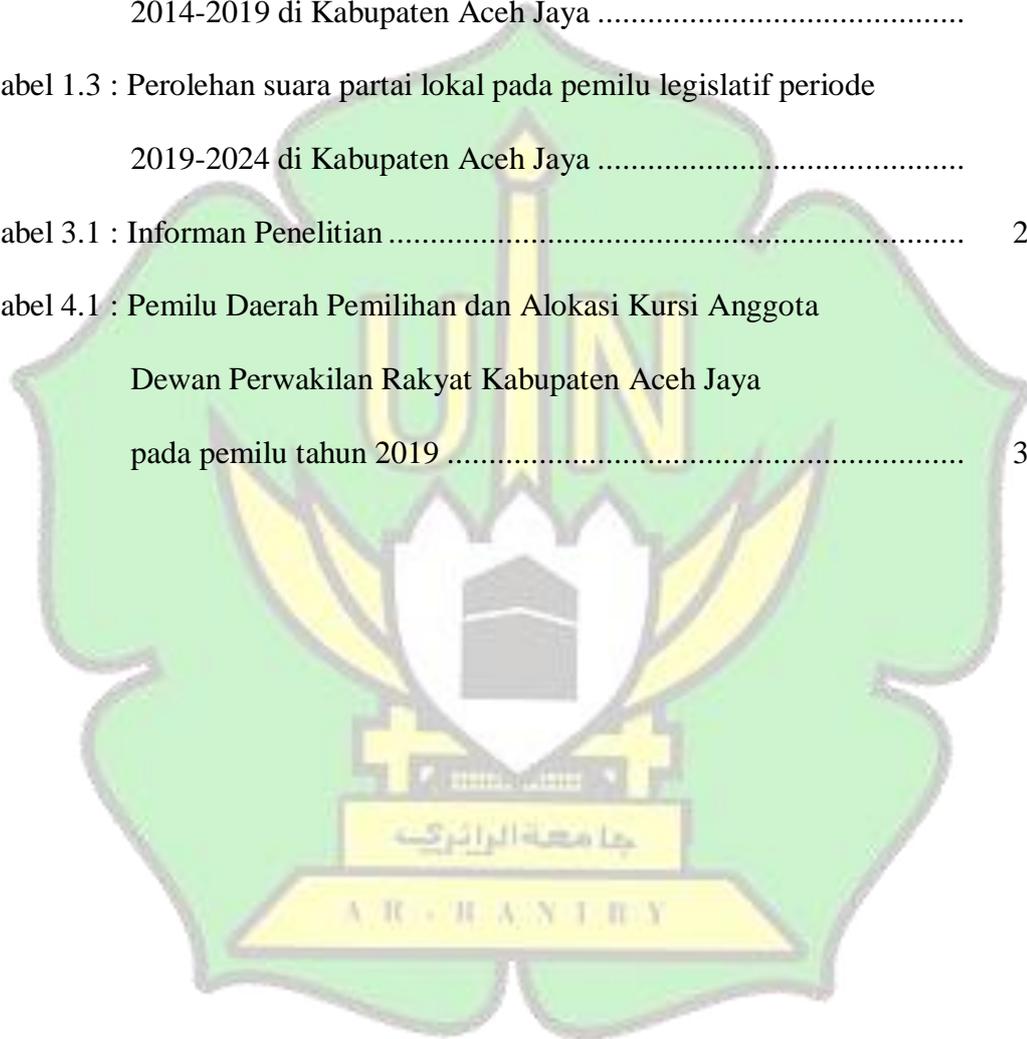
<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	25
3.5 Informan Penelitian .....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	28

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Profil Aceh Jaya dan Peta Pemilu Aceh Jaya 2019 .....	29
4.2 Profil Partai Lokal di Aceh .....	31
4.3 Memori Konflik Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Perolehan Suara Parlok pada Pileg DPRK 2019 .....	35
4.3.1 Memori Kolektif Masyarakat Aceh Jaya Terkait Konflik Antara GAM vs RI (1976-2005) .....	35
4.3.1 Pengaruh Memori Konflik Terhadap Perolehan Suara Parlok .....	41
4.3.1 Perilaku Memilih: Kekuatan Figur Caleg dan Bantuan Sosial.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Hasil rekapitulasi suara partai politik pada Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Aceh Jaya .....	5
Tabel 1.2 : Perolehan suara partai lokal pada pemilu legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Aceh Jaya .....	6
Tabel 1.3 : Perolehan suara partai lokal pada pemilu legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Aceh Jaya .....	7
Tabel 3.1 : Informan Penelitian .....	26
Tabel 4.1 : Pemilu Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada pemilu tahun 2019 .....	30



## DAFTAR ISTILAH



BARSELA	: Barat Selatan
CALEG	: Calon Legislatif
DAPIL	: Daerah Pemilihan
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPC	: Dewan Perwakilan Kecamatan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPW	: Dewan Perwakilan Wilayah
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
HAM	: Hak Asasi Manusia
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
MoU	: Memorandum of Understanding
PA	: Partai Aceh
PARLOK	: Partai Lokal
PARNAS	: Partai Nasional
PDA	: Partai Daerah Aceh
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILEG	: Pilihan Legislatif
PNA	: Partai Nanggroe Aceh
RI	: Republik Indonesia
TNI	: Tentara Negara Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Pemerintah Aceh

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Profil Informan

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang dilakukan di Helsinki, Finlandia. Perundingan damai tersebut menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinki. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberi wewenang untuk mendirikan partai lokal (parlok). Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang Konflik antara RI dan Aceh telah melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup menyitakan perhatian dunia yang dianggap gerakan separatisme oleh pemerintahan pusat. Kemudian pada 15 Agustus 2005 pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menyepakati penandatanganan Memorandum of Understanding di Helsinki Finlandia. Perjanjian MoU tersebut melahirkan berbagai kesepakatan, salah satu butir dari MoU Helsinki adalah Aceh mendapatkan keistimewaan yaitu dapat mendirikan partai lokal sendiri yang hanya mengikuti pemilu di daerah Aceh.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi yang telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak dapat mewujudkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik suatu bangsa. Dan menjadikan pemilu sebagai perwujudan demokrasi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu sudah dimulai sejak awal kemerdekaan dan

sudah diatur dalam kurun waktu tertentu yaitu lima tahun sekali dengan tujuan menciptakan suatu negara yang demokratis. Dengan adanya pemilu tentu adanya partai politik yang ikut serta dalam perebutan kekuasaan.

Pemilu merupakan ajang perebutan kekuasaan yang terjadi di Indonesia yang di ikuti oleh sejumlah partai politik di Indonesia. Pemilu yang dilakukan serentak ini yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) diselenggarakan di Provinsi Aceh. Pemilu Legislatif (Pileg) di Aceh, bisa disebut berbeda dengan pileg yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Aceh terdapat sejumlah partai politik lokal (parlok) yang ikut berkompetisi melawan partai nasional dalam pesta demokrasi. Namun pada Pemilu 2019 diadakan serentak dalam menyambut pesta demokrasi, hal ini membuat sebagian besar masyarakat kebingungan dalam menentukan pilihannya dikarenakan banyaknya partai dan calon yang di usung oleh partai yang mengikuti pemilu tersebut. Pada pemilu 2019 terdapat empat parlok kembali bertarung memperebutkan kursi ke DPRK dan DPRA. Mereka bersaing dengan kader-kader partai politik nasional. Keempat parlok itu adalah, Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Daerah Aceh (PDA), dan Partai SIRA.

Secara umum, partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis dan mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja

dari suatu Negara.<sup>1</sup> Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Indonesia yang berdomisi di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dari cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.<sup>2</sup>

Peraturan partai politik lokal di Aceh terbentuk di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. kemudian pengaturan tersebut disusul lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang partai politik lokal di Aceh sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Partai politik lokal. Sebagaimana aturan partai politik difungsikan, maka partai lokal Aceh juga mempunyai fungsi yang sama yaitu salah satunya sebagai kotak penyampaian aspirasi politik bagi seluruh masyarakat Aceh. Sehingga pada saat pemilu semua partai lokal bertarung untuk meraih suara dari masyarakat untuk menjalankan fungsi partai politik. Status Aceh sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan yaitu otonomi khusus yang diberlakukan di Aceh selama ini telah melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar dari daerah lain, terlebih dengan dilegalkannya partai politik lokal di Aceh. Dengan hadirnya partai lokal Aceh, membuat perolehan suara partai

---

<sup>1</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013, hal 65.

<sup>2</sup> Qanun Aceh No.3 Tahun 2008.

nasional lainnya menurun drastis pada pemilu pertama partai lokal Aceh tahun 2009.

Setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian Hukum dan HAM, terdapat 14 partai lokal yang dinyatakan lulus pada pengujian Departemen Hukum dan HAM RI. Kemudian melalui proses verifikasi faktual sesuai dengan aturan perundang-undangan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), menetapkan hanya 6 partai lokal yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2009.<sup>3</sup> Partai lokal mulai mengikuti pemilu pertama kali pada pemilu 2009 bertarung dengan partai nasional lainnya. Dimana pada tanggal 9 April 2009 yang lalu adalah pemilu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) diselenggarakan di Provinsi Aceh, partai politik lokal hanya diperbolehkan di tingkat legislatif daerah dan tidak diizinkan untuk maju ke parlemen nasional dan membuat partai lokal mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat.

Sementara pemilu legislatif 2019 partai lokal meraih 12 kursi dari 20 total kursi yang tersedia. Hanya saja pada pemilu 2019 parlok yang berhasil mendapatkan kursi yaitu Partai Aceh 7 kursi, Partai Nasional Aceh (PNA) mendapatkan 3 kursi selanjutnya PDA 2 kursi dan partai Sira belum mendapatkan kursi. Selebihnya, Partai Golkar 2 kursi, Demokrat 2 kursi, PAN 1 kursi, PPP 1 kursi dan Gerindra 1 kursi.<sup>4</sup> Artinya Ada hal positif didalam tubuh partai lokal

---

<sup>3</sup> Syamsyudin, "*Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Aceh Timur*," Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016 Hal 145.

<sup>4</sup> <http://liputanrakyat.com/hasil- sementara-parlok-berjaya-di-aceh-jaya/> diakses pada 16 Mei 2019 pukul 10:00 wib.

yang berhasil mengalahkan partai nasional. Memang terjadi pergeseran ketika partai lokal besar yaitu Partai Aceh sebagai partai yang dulu meraih 10 dari 20 Kursi parlemen, sementara pada pemilu legislatif 2019 hanya meraih 7 kursi. Sedangkan Partai PNA mampu meraih 3 kursi dari sebelumnya kosong, dan partai PDA meraih 2 kursi dari 1 kursi pada pemilu sebelumnya. Namun menurunnya kursi partai Aceh tidak berdampak kepada penurunan kursi partai lokal. Hal ini dikarenakan pada pemilu legislatif DPRK Aceh Jaya 2019 adanya penyebaran suara partai lokal.

Hasil rekap suara sah dapil pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Aceh Jaya<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Hasil Rekapitulasi suara partai politik pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Aceh Jaya.**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Keterangan
1	GOLKAR	3	Setiap dapil mendapatkan 1 kursi kecuali dapil 4
2	DEMOKRAT	2	Dapil 1 dan dapil 3 mendapatkan 1 kursi kecuali dapil 2 dan dapil 4 mendapatkan 0 kursi.
3	PDA	2	Dapil 3 dan dapil 2 mendapatkan 1 kursi kecuali dapil 1 dan 3 mendapatkan 0 kursi
4	SIRA	0	0 kursi dari semua dapil
5	PA	7	Dapil 1 3 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 1 kursi dan dapil 4 2 kursi
6	PNA	3	Setiap dapil mendapatkan 1 kursi kecuali dapil 4
7	PAN	1	Terdapat di dapil 3
8	GERINDRA	1	Terdapat di dapil 4

<sup>5</sup> infopemilu.kpu.go.id di akses pada 03 Maret 2020 pukul 20:00 wib.

9	PPP	1	Terdapat di dapil 4
---	-----	---	---------------------

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi suara partai politik yang bertarung pada pileg DPRK Aceh Jaya 2019. Salah satu daerah di Aceh yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap partai lokal yaitu kabupaten Aceh Jaya. Di Aceh Jaya parlok mendapatkan kepercayaan lebih terlihat pada perolehan kursi legislatif partai lokal. Pemilu legislatif 2014 Aceh Jaya mendapat perolehan kursi parlok sebanyak 11 kursi berhasil mengalahkan partai nasional. Dari 4 partai lokal hanya 2 partai yang mendapatkan kursi di parlemen yaitu Partai Aceh (PA) sebanyak 10 kursi dan Partai Daulat Aceh (PDA) mendapat 1 kursi sementara partai nasional berhasil meraih 10 kursi dari 20 kursi yang tersedia<sup>6</sup>.

**Tabel 1.2**

**Perolehan suara partai lokal pada pemilu legislatif periode 2014-2019 di Kabupaten Aceh Jaya.**

Dapil	Kecamatan	Partai Lokal	Jumlah
1	(Jaya, Indra Jaya)	PA	2
2	(Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia TBakti)	PA	3
3	Krueng Sabe, Panga	PA	3
4	Teunom, Pasi Raya	PA	2
		PDA	1
	Jumlah	2 parlok	11 kursi

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber.

<sup>6</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2014/08/13/besok-anggota-dprk-aceh-jaya-dilantik> diakses pada 21 Januari 2020

Tabel 1.3

**Perolehan suara partai lokal pada pemilu legislatife periode 2019-2024 Kabupaten Aceh Jaya.**

Dapil	Kecamatan	Partai lokal	Jumlah kursi
1	Krueng Sabe, Panga	PA	3
		PNA	1
2	Teunom, Pasi Raya	PA	1
		PNA	1
		PDA	1
3	(Jaya, Indra Jaya)	PA	1
		PNA	1
		PDA	1
4	(Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti)	PA	2
Jumlah		3 Parlok	12 kursi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Independem Pemilihan KIP Aceh Jaya. Tiga dari empat partai lokal yang bertarung di pemilu legislatif 2019 meraih suara terbanyak. Ketiga parlok tersebut ialah PA, PNA dan PDA.

Terlihat ada penyebaran suara parlok pada pemilu 2019-2024 dibandingkan pemilu periode 2014-2019. Walaupun sebelumnya parlok memang sudah unggul di Aceh Jaya namun parlok periode sebelumnya tidak menyebar seperti pada pemilu 2019. Untuk periode 2014 terlihat ditabel di atas bahwa parlok yang berkuasa yaitu partai Aceh 10 kursi kemudian disusul oleh PDA 1 kursi. Artinya periode 2014 belum ada penyebaran kursi parlok di parlemen. Namun pada pemilu periode 2019 terlihat suara parlok menyebar termasuk kepada

PNA. Jika semua parlok sejalan dan searah, maka di parlemen Aceh Jaya akan mengukir sejarah baru, karena parlok bisa menjadi terdepan dalam menentukan kebijakan di parlemen. Melihat perkembangan politik Aceh Jaya sekarang dan jika berdasarkan aspirasi masyarakat tentu harapan sangat menginginkan agar partai lokal dapat bersatu. Bila elit parlok menyadari dan melepaskan ego sektoral maka koalisi adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan parlok kedepan. Hal ini dipicu oleh adanya ego sektoral dikalangan pemangku kekuasaan yang berniat untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya pada pemilu sebelumnya. Bahkan menurut ketua DPC Teunom partai lokal terkhusus partai Aceh memiliki beberapa kader yang rakus akan jabatan. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan partai lokal dalam pandangan masyarakat. Sehingga pada pemilu legislatif 2019, menjadi awal yang baru untuk mempersatukan parlok di parlemen untuk mengurangi ego elit partai demi satu tindakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melihat dari semakin banyak penyebaran parlok berarti sudah mulai terciptanya koalisi antara parlok di Kabupaten Aceh Jaya dan ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk melawan partai nasional. jika parlemen dikuasai oleh parnas kemungkinan besar yang harus diwaspadai oleh parlok ialah ketakutan akan kehilangan kekuatan dari pusat. Dan parlok sampai pada pemilu 2019 ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Aceh Jaya kedepan dibandingkan partai nasional. Keberhasilan suara partai lokal tidak terlepas dari masyarakat yang telah memilih partai lokal dan kinerja pengurus dan caleg yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dengan sangat baik.

Dari tabel 1.2 dan 1.3 dapat dilihat bahwasanya suara partai lokal lebih unggul dibandingkan partai nasional. Penelitian ini menarik diteliti justru ketika partai lokal mampu menarik perhatian masyarakat Aceh Jaya dikarenakan mampu mempersatukan partai lokal dibandingkan daerah lain di Aceh yang masih dikuasai oleh partai nasional. Hal tidak terlepas dari sejarah panjangnya konflik yang pernah terjadi di Aceh yaitu antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan Pemerintah pusat RI. Konflik tersebut telah meninggalkan trauma yang dalam bagi masyarakat Aceh. Namun yang menariknya justru ingatan masalah masyarakat Aceh Jaya semakin berkurang dengan adanya dinamika politik sekarang ini. Dimana memori kolektif masalah masyarakat Aceh Jaya tentang konflik tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat masa kini. Masyarakat mengetahui konflik antara GAM dan RI tersebut telah meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat Aceh Jaya. Tetapi untuk pilihan hati masyarakat dalam memilih partai, masyarakat enggan melibatkan memori kolektif masalah masyarakat dengan konflik. Jadi terdapat memori konflik yang terlupakan di dalam karakteristik masyarakat Aceh Jaya atau istilah lain yaitu pelupaan kolektif masyarakat terhadap peristiwa yang pernah terjadi di masalah. Istilah pelupaan dalam penelitian ini bukan sama sekali tidak mengingat tentang konflik tersebut, tetapi untuk dinamika perpolitikan saat ini masyarakat lebih fokus ke masa depan Aceh Jaya ketimbang harus mengingat konflik pada saat pemilu berlangsung. Artinya partai lokal mempunyai figur yang berkualitas dalam mendapatkan suara masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, Aceh Jaya mampu mempertahankan parlok di DPRK. Jadi ini menjadi awal yang baik untuk Aceh Jaya kedepan ketika partai

lokal sudah mulai bersatu dan dapat membangun dengan baik daerah sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi ego sektoral yang dimiliki oleh elit-elit partai lokal yang sebelumnya dikenal tidak akurat sekarang justru dapat membangun daerah Aceh Jaya dengan lebih baik lagi kedepan. Ditambah dengan banyaknya caleg dari parlok pada pemilu 2019 tergolong caleg baru yang sebelumnya belum pernah menjabat atau mencalonkan diri pada pileg sebelumnya. Namun caleg-caleg dari parlok ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Aceh Jaya dengan upayanya bersosialisasi baik dengan pemuda dan masyarakat umum.

### **2.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terkait konflik bersenjata antara GAM dan RI?
2. Bagaimana pengaruh memori kolektif terhadap perolehan suara parlok pada pileg DPRK Aceh Jaya tahun 2019?

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terhadap konflik GAM dan RI dan pengaruh memori kolektif terhadap perolehan suara parlok pada pemilu DPRK Aceh Jaya 2019.

### **4.1 Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian terbagi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai memori kolektif masyarakat tentang konflik terhadap perolehan suara partai lokal.

## 2. Manfaat praktis

Untuk akademisi penelitian ini dapat menjadi pemberi wawasan yang lebih luas untuk direalisasikan ke kehidupan nyata untuk menambah pemahaman tentang memori kolektif. Dan untuk masyarakat dapat menjadi referensi ketika pemilu kedepan untuk melihat sejauh apa partai lokal mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat sehingga parlemen dapat total dikuasai oleh partai lokal ketimbang harus dikuasai oleh partai nasional



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Memori Kolektif**

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana memori kolektif atau ingatan kolektif itu dilupakan seiringan dengan perkembangan politik masa kini. Melupakan kolektif mempengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri karena narasi masa lalu digunakan untuk melegitimasi identitas nasional.<sup>7</sup> Memori kolektif terdiri dari dua kata, yakni memori dan kolektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memori adalah kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Memori tersebut berupa ingatan, catatan yang berisi penjelasan, peringatan dan keterangan. Sedangkan kolektif diartikan secara bersama atau secara gabungan. Jadi memori kolektif, merupakan gabungan ingatan atau kesadaran sekelompok masyarakat di masa lampau yang hidup kembali padamasa kini untuk dimaknai sekaligus menjadi cerminan kehidupan bersama.<sup>8</sup>

Sedangkan Emile Durkheim dalam memahami konsep ingatan, menempatkan dimensi kolektif dalam suatu masyarakat yang disebutnya sebagai fakta sosial. Bagi Durkheim, makna simbolik dalam suatu masyarakat lahir melalui interaksi antara individu yang hadir dengan simbol-simbol yang berbeda-

---

<sup>7</sup> Cindy Minarova-Banjac. (2018). *Collective Memory and Forgetting: A Theoretical Discussion*, (Centre for East-West Cultural & Economic Studies; No. 16). Bond University. Hlm 3.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eletronik, diakses 12 Agustus 2020

beda kemudian masing-masing individu tersebut menggunakannya dalam proses berinteraksi dengan individu lain sehingga menciptakan kolektivitas. Hal tersebut membuat individu secara utuh meleburkan dirinya dalam komunitas dengan simbol kolektif. Simbol itu kemudian diwariskan ke generasi masyarakat berikutnya melalui ingatan bersama dalam skala waktu tertentu, sehingga membentuk struktur ingatan kolektif.<sup>9</sup>

Ingatan kolektif dapat dimengerti sebagai hubungan antara keadaan di masa sekarang, dan ingatan atas masa lalu. Dengan begitu, ingatan kolektif dapat dimengerti sebagai rekonstruksi sosial atas masa lalu dari sudut pandang masa kini.<sup>10</sup> Halbwachs mencoba menjelaskan secara jalan lain, Ingatan kolektif sebuah masyarakat selalu diakui sebagai bagian dari ingatan bersama. Artinya, semua anggota masyarakat mengetahui isi dari ingatan tersebut, dan mengakuinya sebagai versi yang sah. Ingatan kolektif semacam ini tertanam juga di dalam pikiran kolektif masyarakat tersebut sebagai sebuah kelompok, misalnya dalam bentuk berbagai monumen dan cerita-cerita yang tersebar di masyarakat tentang masa lalu. Semua ini juga tersebar di masyarakat itu sendiri, dan diakui sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat tersebut.

Ingatan kolektif melihat masa lalu dari sudut pandang masa kini. Ia juga selalu tertanam dalam ingatan individu di suatu masyarakat. Tentang ini, Halbwachs menulis bahwa:

---

<sup>9</sup> Fowler Bridget, *The Obituary as Collective Memory*, London: Routledge, 2007. Hlm 31.

<sup>10</sup> Coser, Lewis. A. (Editor dan Penerjemah), dalam: Halbwachs, Maurice, *On Collective Memory*, Chicago, 1992, The University of Chicago Press. Hlm 34.

Ingatan dari masyarakat ada sejauh ingatan dari kelompok-kelompok yang menciptakannya. Sakit dan ketidakpedulian tidak akan dapat melupakan semua peristiwa dan orang-orang yang ada. Walaupun begitu, kelompok-kelompok yang menjaga ingatan ini akan pergi. Ketika usia manusia menjadi lipat dua atau tiga, ruang dari ingatan kolektif yang diukur dan ukuran waktu juga akan berkembang. Pada semua kasus, karena ingatan kolektif tergantung pada anggota-anggota individual, terutama yang berusia tua, ingatan kolektif akan terus berubah sejalan dengan perubahan kelompok itu sendiri.<sup>11</sup>

Jadi Ingatan kolektif atau memori kolektif juga tidak pernah mutlak dan menyeluruh. Ingatan kolektif juga dapat selalu tertanam di dalam konteks sosial tertentu, yakni masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah pelestari sekaligus bentukan dari ingatan kolektif yang ia punya. Ingatan kolektif juga amat membutuhkan kehendak politik dari kelompok yang mengingatnya. Keberadaan ingatan kolektif tergantung dari keberadaan kehendak politik sebuah masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkannya. Latar belakang masa lalu diungkapkan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang diciptakan masyarakat dalam konteks sosialnya seperti tempat dan teman bergaul yang memungkinkan tindakan mengingat tersebut yang memiliki kemandiriannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai memori kolektif. Dalam arti ini tindakan mengingat tidak semata dilakukan secara pribadi, tetapi secara kolektif, yakni ingatan sebuah kelompok, sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. memori kolektif semacam ini menjadi dasar bagi identitas kolektif masyarakat termasuk bagaimana masyarakat itu memandang dirinya sendiri.<sup>12</sup> Jika masyarakat melupakan

---

<sup>11</sup> Halbwachs, Maurice. *The Collective Memory*, in: *The Collective Memory Reader*, Olick, Jeffrey, et.al., Oxford, 2011, Oxford University Press, 139-149. Teks asli: Halbwachs, Maurice: *The Collective Memory*, Terjemahan oleh Francis J. Ditter Jr. dan Vida Yazdi Ditter, New York, 1980, Harper & Row, 45-49, 80-87, 4-7.

<sup>12</sup> Maurice Halbwachs dalam Reza A.A Wattimena. *Indonesia, Nasional dan Ingatan Kolektif*. Surabaya: Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, 2010.

itu artinya tidak ada pelestarian tentang memori kolektif yang telah diingat dan adanya upaya melupakan dari masyarakat itu sendiri.

Halbwachs dengan tegas menyatakan bahwa memori kolektif bukanlah cerminan peristiwa masa lampau yang akurat, melainkan sebuah representasi kebutuhan masa kini dan harapan akan masa depan. Memori kolektif dapat dengan mudah melepaskan ingatan akan suatu peristiwa masa lalu, jika peristiwa tersebut dipandang merugikan masa kini, dan membunuh harapan akan masa depan yang lebih baik dan sebaliknya memori kolektif dapat dengan mudah menciptakan ingatan baru terhadap suatu peristiwa, terutama jika peristiwa tersebut mampu memberikan makna pada masa kini dan alasan untuk berharap pada masa depan yang lebih baik.<sup>13</sup> Sehingga ada ingatan masa lalu yang dapat dilupakan karena tidak layak untuk diingat kembali dan dapat mempengaruhi perpolitikan masa kini.

Seperti yang dikatakan oleh Norquay (1999) dan Assman (2008), menyatakan bahwa melupakan adalah bagian integral dari memori dan bahwa mengungkap apa yang dihilangkan dan dianggap tidak layak untuk diingat adalah penting untuk memahami bagaimana kelompok mendefinisikan sejarah dan identitas mereka.<sup>14</sup> Selain menjelaskan perilaku aktor dan pengambilan keputusan, memori kolektif juga dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami bagaimana masyarakat dapat mendamaikan dan melewati pengalaman traumatis

---

<sup>13</sup> Halbwach, *Memoire Collective, terjemahan. Coser, Collective Memory*, hlm 147-148.

<sup>14</sup> Cindy Minarova-Banjac. 2018. *Collective Memory and Forgetting: A Theoretical Discussion*, ( *Centre for East-West Cultural & Economic Studies; No. 16*). Bond University. Hlm 7.

dan menyakitkan. Mengidentifikasi pelupaan langsung dan tidak langsung dapat menunjukkan bagaimana masa lalu diingat, dan aspek apa yang diremehkan, disembunyikan, dan dilupakan. Memori kolektif mengacu pada persepsi bersama tentang masa lalu, di mana masyarakat memastikan kesinambungan budaya dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam narasi kelompok.

### 2.1.2. Perilaku Politik

Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye)<sup>15</sup> Jadi Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.

Perilaku politik adalah tindakan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga dapat diartikan sebagai tindakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.<sup>16</sup> Membahas perilaku politik kita dapat melihat tingkat kepuasan pemilih terhadap elit atau partai politik tersebut apakah akan melahirkan kepuasan atau kekecewaan pemilih. Dalam diri masing-masing

---

<sup>15</sup>H. Basuki Rachmat Dan Esther. *Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, 101 XLII No. 2, Tahun 2016. Hlm 27.

<sup>16</sup>Ramlan Surbakti. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo. 1992. hlm 131.

individu terdapat yang namanya kepuasan. Ini merupakan unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap kandidat atau partai politik. Bahkan semua usaha harus diperhatikan sebaik baiknya untuk menciptakan situasi yang membuat pemilih merasa puas terhadap kandidat atau partai politik yang dipilih. Bahkan semuanya akan bergantung seberapa besar harapan awal pemilih. Puas atau tidaknya pemilih sangat tergantung pada harapan awal yang muncul karena janji-janji suatu partai politik. Dan tingkat kepuasan pemilih ini dapat dilihat bagaimana perilaku elit politik partai dalam menawarkan harapan kepada masyarakat. Kepuasan pemilih ini akan sangat berpengaruh dalam membantu untuk meningkatkan reputasi dan citra partai politik dalam jangka panjang. Dan dapat melihat tolak ukur kepercayaan masyarakat atau pemilih terhadap kandidat atau partai politik atas keputusan mereka.

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku dalam menentukan pilihannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, seperti isu-isu dan kebijakan politik. Akan tetapi tak sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan agama yang dianut oleh sang calon, kelompok lain juga melihat berdasarkan kelas sosialnya, figur sang calon hingga pengaruh elit partai serta aliran atau ideologi politik.<sup>17</sup>

Perilaku pemilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang calon legislatif (caleg) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang

---

<sup>17</sup> Novella Putriasafa, 2016. *Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015 (Studi Di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung)* Skripsi FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung hlm 12.

dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis, yang pertama kali dikenalkan oleh sarjana Ilmu Politik dari Universitas Michigan, yaitu: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau partisanship.<sup>18</sup> Jadi dalam penelitian ini yang menjadi pusat pendekatan psikologis ialah persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat. Dimana pemilih merasa mengenal baik dengan kandidat yang telah mencalonkan diri pada pemilu DPRK Aceh Jaya 2019. Walaupun sebagian pemilih bukan kerabat dari kandidat tetapi mempunyai ikatan emosional antara si kandidat dengan si pemilih. Pendekatan psikologi dalam penelitian ini melihat bahwa masyarakat memilih dikarenakan adanya kedekatan langsung antara kandidat dan pemilih seperti dari lingkungan, menyukai pogram kerja dari caleg, memiliki rekam jejak si caleg. Perilaku memilih lebih mengarah penilaian pribadi terhadap caleg, ataupun isu yang diangkat oleh caleg. Dan perilaku memilih ini lebih bersifat individual dalam menilai baik itu caleg maupun partai politik pengusungnya.

### **2.1.3. Partai Politik Lokal**

Menurut Miriam Budiarjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

---

<sup>18</sup> RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin. *Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta.

Partai politik Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah.<sup>19</sup> Berdasarkan Qanun No 3 tahun 2008, Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Indonesia yang berdomisi di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dari cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun asas partai politik lokal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 77 ayat (1). Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ayat (2). Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan tujuan partai politik lokal secara umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan

---

<sup>19</sup> Feisal Akbar, Dr. Mujibussalim, *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*. Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2. 3 Juli 2017. hlm 7

rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.<sup>20</sup>

Partai politik lokal merupakan sarana bagi masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pemerintahan. Tujuan pembentukan partai politik lokal sebagai desentralisasi untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya partai politik lokal akan dapat merekatkan kesatuan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya.<sup>21</sup>

## **2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan**

Adapun penelitian sebelumnya yaitu jurnal Polarisasi Kekuatan Partai Politik Lokal Aceh: Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Periode Tahun 2009-2014 oleh Mustaqim, Usman Tarigan dan Rudi Salam Sinaga.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat polarisasi kekuatan partai politik

---

<sup>20</sup> UU RI. No. 11 Tahun 2006., hlm.110-111

<sup>21</sup> Fattaqun, Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Nagroe Aceh Darussalam, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Hlm 82.

lokal di Kabupaten Aceh Timur melalui kekuatan partai politik di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini memperlihatkan tingginya dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur ketika menjelang momentum pemilihan umum dan dinamika politik yang terjadi masih berada pada pengaruh kekuatan politik lokal yang menjadikan partai politik lokal sebagai kekuatan utama dalam polarisasi kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Adapun penelitian lain yaitu skripsi Siti Fardillah “Memori Kolektif masyarakat kota Banda Aceh terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”<sup>23</sup>. Persamaan dengan penelitian ini ialah samasama menggunakan teori Memori Kolektif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dan penelitian ini di fokuskan pada objek Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya memori kolektif yang tidak baik pada masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap PDI Perjuangan sehingga mengalami penurunan suara dan tidak mendapatkan kursi di DPR Kota Banda Aceh pada pemilu Legislatif 2014.

Penelitian tentang Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh Studi Penelitian terhadap Konflik antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh pada

---

<sup>22</sup> Mustaqim, dkk. *Polarisasi Kekuatan Partai Politik Lokal Aceh: Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Periode Tahun 2009-2014*. Jurnal Ilmiah Kajian parlok dan Pembangunan. Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Medan Area. 2014..hlm 66.

<sup>23</sup> Siti Fardillah. *Memori Kolektif masyarakat kota Banda Aceh terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*. Skripsi Universtitas Syi'ah Kuala Banda Aceh 2016. Hlm

Pemilu Tahun 2014.<sup>24</sup> Menggunakan teori resolusi konflik dan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwanya kurangnya moral dan ilmu dari calon legislatif yang maju pada pemilu, adanya persaingan yang tidak sehat antar kedua partai, dan adanya ikut campur pihak di luar partai sehingga membuat konflik tersebut semakin memanas. Adapun dampaknya yaitu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif dan dapat mempengaruhi keseimbangan demokrasi di Aceh. Dan seharusnya Partai Aceh sebagai partai lokal tetap dapat mempertahankan eksistensi partai lokal di mata masyarakat Aceh.

Adapun penelitian sebelumnya ialah penelitian Rosi Ardayanti dengan judul dinamika politik partai lokal di Kabupaten Aceh Jaya (studi konflik Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) pada pemilu legislatif tahun 2014).<sup>25</sup> Penelitian juga mengangkat tentang partai lokal tetapi dispesifikkan pada 2 partai yaitu hanya PA dan PNA. Penelitian ini menggunakan teori konflik dimana perseteruan yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 dengan studi kasus di desa Babah Dua Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian ini konflik yang terjadi antara PA dan PNA disebabkan oleh perselisihan merebut kekuasaan pada pemilu 2014. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak Partai Aceh. PA menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan pada pemilu legislatif

---

<sup>24</sup> Haris Aswansyah, *Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh Studi Penelitian terhadap Konflik antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh pada Pemilu Tahun 2014*. Skripsi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2018. Hlm

<sup>25</sup> Rosi Ardayanti, "*Dinamika politik Partai Lokal di Kabupaten Aceh Jaya (studi konflik partai aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) pada pemilu legislatif tahun 2014)*," Skripsi fakultas fisipol universitas syiah kuala Banda Aceh, 2016.

2014 namun berujung kekerasan terhadap tim pemenang PNA. Bahkan konflik ini berpengaruh terhadap interaksi masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi masyarakat ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat DPRK dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah analisis data penelitian ini difokuskan pada Memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terkait konflik GAM vs RI dan Perolehan Suara Parlok pada Pemilu DPRK 2019

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh lokasi yang dipilih yaitu kecamatan Teunom dan Pasi Raya. Hal ini dikarenakan memenuhi ketiga parlok mendapatkan kursi di DPRK Aceh Jaya. Sementara di dapil lain seperti dapil 1

---

<sup>26</sup>Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Cet. XIV, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), Hlm.16.

mendapatkan 4 parlok tetapi yang mendapatkan kursi hanya PA dan PNA. Sedangkan di dapil 2 ketiga parlok mendapatkan masing-masing 1 kursi di parlemen yaitu PA, PNA, dan PDA. Untuk memperoleh ketiga parlok yang menduduki DPRK Aceh Jaya, peneliti memilih dapil 2 sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data dari seluruh parlok yang menduduki parlemen pada pemilu legislatif 2019.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu kualitatif

#### **3.1.2. Sumber Data**

Sumber data ialah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut sumbernya data dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan masyarakat yang mengikuti pemilu 2019 di Aceh Jaya.
2. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dan ditemukan dengan cepat untuk menyelesaikan masalah dari penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah surat kabar, literatur, artikel,

jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup>

### 3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi serta latar belakang dari pembahasan yang ingin diteliti.<sup>28</sup>. informan penelitian yang dimaksud ialah masyarakat yang memilih partai lokal di daerah dapil 2 yaitu kecamatan Teunom dan Pasi Raya dan pengurus dari 3 partai lokal yang mendapatkan kursi pada pemilihan legislatif 2019 yaitu PA, PNA dan PDA.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Kategori	Jumlah
1.	Masyarakat yang memilih parlok di dapil 2	Pedagang	6 orang
		Petani	11 orang
		Lulusan sarjana	4 orang
2.	Pengurus Partai Lokal yang terpilih pada dapil 2		4 orang
	Dewan terpilih dari fraksi partai lokal dapil 2		3 orang
	Timses caleg parlok		2 orang
Jumlah		30 Orang	

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Interview (wawancara) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hal. 137.

<sup>28</sup> Sugiyono. 2007. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R & D*. Bandung: Elfabet. Hal.85.

pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama<sup>29</sup> guna mengali informasi mengenai pokok permasalahan.

Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian sehingga yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah masyarakat dapil 2 kecamatan Teunom dan Pasi Raya yang mengikuti pemilihan umum 2019 dan pengurus serta dewan yang terpilih dari fraksi partai lokal yang mendapatkan kursi pada pemilu 2019 .

- Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seorang secara tertulis baik tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen jenis ini bisa berupa buku, biografi tokoh yang merekam track record tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm.108

<sup>30</sup> Yustinus Usfinit, Agung Suprojo, Dody Setyawan, *Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malangjisp*: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Issn. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014). Hlm.40.

masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.<sup>31</sup>

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif kualitatif.<sup>32</sup>

Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisa data yang dilakukan yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dari objek penelitian yang ada. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dari objek penelitian yang ada.

---

<sup>31</sup> Drs. Taufiq Rahman Dhohri, M.Si, Dkk. *“Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat”*. Cet : Kedua (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia, hlm. 91.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 83

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Profil Aceh Jaya dan Peta Pemilu Aceh Jaya tahun 2019

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Aceh Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Aceh Barat yang dibentuk pada 22 Juli 2002. Wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 9 kecamatan; Kecamatan Teunom, Pasi Raya, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Darul Hikmah, Jaya dan Indra Jaya, dengan ibu kota Calang dan 21 mukim dan 172 desa.<sup>33</sup> Saat ini Bupati Aceh Jaya dijabat oleh T. IrfanTB dan Wakil Bupati yaitu Tengku Yusri S. DPRK Aceh Jaya memiliki 20 anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilu legislatif yang berlangsung lima tahun sekali. Anggota DPRK Aceh Jaya yang sedang menjabat saat ini adalah dewan dari hasil pemilu 2019 dengan periode masa jabatannya 2019-2024 yang berasal dari 8 partai politik. Adapun pimpinan DPRK Aceh Jaya saat ini yaitu terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Jaya periode 2019-2024 dijabat oleh Muslem D dewan dari Fraksi Partai Aceh sebagai Ketua dan Teuku Asrizal dari fraksi Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II dan jabatan Wakil Ketua I Teungku Hazami Dewan Fraksi PNA. Kabupaten Aceh Jaya berada dalam iklim tropis yang hangat dan lembab. (Aceh Jaya Dalam Angka 2014).

---

<sup>33</sup> <http://www.acehjayakab.go.id/> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 14:00 wib.

Adapun jumlah Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam pemilu Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Pemilu Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada pemilu tahun 2019**

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	
			Parlok	Parnas
1.	DP Aceh Jaya 1 meliputi Kecamatan		4	2
	1.1 Krueng Sabe	15,802		
	1.2 Panga	7,857		
2.	DP Aceh Jaya 2 meliputi Kecamatan		3	1
	2.1 Pasi Raya	6,447		
	2.2 Teunom	12,614		
3.	DP Aceh Jaya 3 meliputi Kecamatan		3	2
	3.1 Indra Jaya	6,858		
	3.2 Jaya	14,565		
4.	DP Aceh Jaya 4 meliputi		2	3
	4.1 Darul Hikmah	6,403		
	4.2 Sampoiniet	7,167		
	4.3 Setia Bakti	8,345		
	<b>Jumlah</b>	<b>86,058</b>	<b>20</b>	

Sumber: [https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK 264 THN 2018](https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK_264_THN_2018).

Dari tabel diatas terlihat bahwa, jumlah alokasi kursi DPRK Aceh Jaya lebih banyak dikuasai oleh partai lokal dibandingkan partai nasional. Jadi Aceh

Jaya merupakan salah satu provinsi di Aceh yang unggul dengan partai lokal. Pada pemilu 2019 Aceh Jaya dikuasai oleh tiga partai lokal, yaitu PA, PNA dan PDA. Untuk pemilu 2019 Aceh Jaya memiliki total 20 kursi DPRK dengan 4 daerah pemilihan dan dengan total penduduk 86,058 jiwa. Dengan Total partai politik yang bertarung pada pemilu legislatif DPRK Aceh Jaya 2019 sebanyak 9 partai politik yang berhasil lolos ke parlemen.

#### 4.2 Profil Partai Lokal di Aceh

Di Aceh Jaya terdapat empat partai lokal yang berhasil maju pada pemilu 2019 untuk perwakilan DPRK Aceh Jaya. Keempat partai lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Daerah Aceh (PDA) dan SIRA. Berikut profil dari ke empat partai lokal yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2019.

Partai Aceh merupakan partai yang pertama lahir langsung dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), partai yang di isi oleh eks kombatan GAM. Partai Aceh lahir pada 7 Juni 2007 dengan tiga kali pergantian nama yang tidak disetujui oleh pusat. Dan akhirnya pada 22 April 2008 pusat menyetujui kehadiran Partai GAM dengan nama baru menjadi Partai Aceh yang diketua oleh ketua umum pertama yaitu Muzakir Manaf.<sup>34</sup> Dengan visi membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan NKRI, dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan

---

<sup>34</sup> <https://www.acehtrend.com/2017/07/19/partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh/> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:20

Gerakan Aceh Merdeka. Dan dengan misi partai Aceh yaitu mentransformasi atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra partai revolusi menjadi citra partai pengembangan dalam tatanan transparansi untuk memakmurkan hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia.<sup>35</sup>

Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan partai lokal yang pertama kali mengikuti pilkada Aceh tahun 2012. Partai lokal ini lahir akibat perpecahan mantan eks kombatan GAM di dalam tubuh Partai Aceh sehingga ketidakcocokan tersebut pertama kali melahirkan konflik dalam partai lokal. PNA lahir pada 22 April 2011 di dirikan oleh Irwandi Yusuf dengan ketua umum Irwansyah alias Tgk Muchsalmina dengan nama Partai Nasional Aceh.<sup>36</sup> Pada 2 Mei 2017, PNA ini mengubah namanya yang awalnya Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu 2019. Sehingga didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Juni 2017 dan disahkan dalam dokumen SK Kemenkumham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017.<sup>37</sup> Partai lokal ini sudah mengalami 2 kali pergantian nama dihitung setelah partai lokal ini didirikan oleh Irwandi Yusuf. Partai Daerah Aceh atau disingkat dengan PDA merupakan partai lokal yang didirikan oleh para ulama dan santri di Aceh. Partai lokal ini berawal dari sebuah lembaga bernama forum Daulat Aceh. Partai ini sudah melakukan 3 kali pergantian nama.

---

<sup>35</sup> <https://news.detik.com/parpol/d-1059309/partai-aceh-39> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 10:16 wib.

<sup>36</sup> <https://m.merdeka.com/partai-nasional-aceh/profil/> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:30 wib

<sup>37</sup> SK Kementerian Hukum dan HAM. Portal Pemilu dan Pileg Komisi Pemilihan Umum. 18 Juli 2017.

Partai lokal ini dibentuk pada 4 Maret 2007 dan dideklarasikan pada 01 Februari 2008 di Banda Aceh. Dan dihadiri oleh 125 ulama seperti Teungku H. Hasanoel Basri (Abu Mudi) dan Teungku H. Muhammad Nasir Wali masing-masing menjabat sebagai Ketua dan wakil Ketua Mustasyar.<sup>38</sup> PDA menyerahkan berkas pendaftaran pada 4 September 2012 yang langsung dilakukan oleh Ketua Umum PDA Teungku Muhibusabri AW, Sekjem PDA Teungku Khaidir, Ketua I Sophan Sofyan, Waled Seulimeum dan semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Para pengurus PDA ini diterima Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan jajarannya. Cikal bakal PDA sebenarnya adalah Partai Daulat Aceh. Namun, karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai batas minimal perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, Partai Daulat Aceh akhirnya berganti nama menjadi Partai Damai Aceh. Dan pada pemilu 2014 PDA juga tidak mendapatkan banyak kursi sehingga pada 2016 PDA berganti nama lagi menjadi Partai Daerah Aceh. Dalam AD/ART Partai Daerah Aceh, PDA didirikan di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2015 berdasarkan dengan hasil Musyawarah Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh dengan berasaskan Islam dengan prinsip perjuangan meningkatkan pendidikan, mewujudkan pengabdian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan melalui penegakan syari'at Islam secara kaffah.<sup>39</sup>

Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) ini dideklarasikan 10 Desember 2007. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, sesuatu yang dijanjikan akan selalu dihormati oleh Partai SIRA. SIRA

---

<sup>38</sup><https://www.acehtrend.com/2017/06/17/pda-partai-santri-yang-kurang-diminati/> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:48 wib

<sup>39</sup> SK Kementerian Hukum dan HAM. Portal Pemilu dan Pileg Komisi Pemilihan Umum. 14 Desember 2016. Diakses pada 10 Agustus 2020.

adalah akronim dari Suara Independen Rakyat Aceh. Akronim tersebut sepintas sama dengan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang naik daun semasa pemberlakuan DOM. Tak heran, Partai SIRA memang didirikan oleh aktivis SIRA referendum, Muhammad Nazar yang kini menjadi Wagub NAD. Dengan VISI dan MISI ialah sebagai berikut: memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh, mendorong perdamaian yang berkelanjutan, memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh, memperjuangkan kedaulatan rakyat, dan menciptakan keadilan sosial serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>40</sup> Namun partai SIRA pada pemilu Legislatif tahun 2019 mendapatkan kursi di DPRK Aceh Jaya.

Adapun partai lokal yang terpilih pada pemilu legislatif Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 adalah :

1. Partai Aceh
2. Partai Nanggroe Aceh
3. Partai Daerah Aceh

Dari keempat partai yang berhasil lolos ke DPRK Aceh Jaya yaitu hanya tiga partai. Sementara untuk partai SIRA belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ketiga partai politik lokal yang berhasil mendapatkan kursi DPRK Aceh Jaya tersebut mempunyai misi dan visi masing-masing terhadap kehidupan rakyat Aceh di masa depan. Namun tujuan umumnya adalah sama yaitu mensejahterakan rakyat Aceh, mempersatukan rakyat Aceh, lebih mementingkan

---

<sup>40</sup><https://news.detik.com/parpol/d-1059314/partai-suara-independen-rakyat-aceh-37> diakses pada 10 Agustus 2020.

kepentingan rakyat Aceh dengan menampung aspirasi rakyat atau keinginan rakyat Aceh dan membantu hal-hal lain dengan ideologi yang berbasis lokal.

### **4.3 Memori Konflik Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Perolehan Suara Parlok pada Pileg DPRK 2019**

#### **4.3.1 Memori Kolektif Masyarakat Aceh Jaya Terkait Konflik Antara GAM vs RI (1976-2005)**

Aceh merupakan provinsi yang memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan. Dan proses yang panjang tersebut tidak terlepas dari perjuangan orang-orang Aceh terdahulu yang bergabung di dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga dengan adanya perdamaian dan terjadinya musibah bencana tsunami di tahun 2004 di Aceh maka lahirlah perdamaian tersebut pada 2005 terbentuklah regulasi perundang-undangan yaitu UUPA dan Qanun sebagai turunannya.

Secara kolektif masyarakat mempunyai memori kolektif terkait konflik antara GAM dan Republik Indonesia (RI). Konflik tersebut menyebabkan masyarakat Aceh kehilangan nyawanya bukan ratusan tetapi ribuan nyawa. Bahkan masyarakat sampai hari ini masih trauma dengan kejadian yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tentu saja masyarakat Aceh mempunyai memori kolektif terhadap konflik tersebut. Konflik tersebut lahir karena rasa ketidakadilan yang diberikan oleh pusat kepada Aceh semasa awal kemerdekaan. Aceh menjadi daerah penyumbang besar untuk kebutuhan rakyat Indonesia hal ini tidak terlepas dari peranan Hasan Tiro dan Daud Beureh dan perjuangan para eks kombatan

yang tergabung ke dalam GAM. Diawal kemerdekaan setelah Aceh membantu Indonesia, Aceh ini tidak diberikan apapun oleh Soekarno. Padahal jika dilihat kebelakang Soekarno sendiri yang telah memberikan janji kepada masyarakat Aceh jika bersedia membantu Indonesia saat itu maka Aceh akan mendapatkan haknya. Namun hal tersebut justru tidak dipedulikan lagi oleh Soekarno dan akhirnya melahirkan satu kelompok pergerakan di Aceh yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan tersebut dianggap sebagai separatisme oleh pusat. Dan kemudian melahirkan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Bahkan Aceh diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa presiden Megawati Soekarno Putri yang meninggalkan kenangan luka kepada masyarakat Aceh dalam kurun waktu 2000an. Kemudian ketika 2004 terjadinya musibah besar tsunami, dan pada 2005 Aceh akhirnya mau berdamai dengan pusat di Firlandia melalui MoU Helsinki. Dari beberapa butir hasil perdamaian tersebut, Aceh dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan membentuk Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun (UUPA) 2006. Salah satu poin penting dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki Finlandia yang merupakan buah dari hasil perdamaian tersebut salah satunya masyarakat Aceh dapat mendirikan partai Lokal (parlok) sendiri. Selain soal otonomi khusus, parlok merupakan syarat yang membuat GAM setuju untuk tetap berada di dalam konstitusi Republik Indonesia, dan membuang jauh-jauh impian Aceh merdeka.

Aceh Jaya merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang ikut merasakan dampak konflik antara GAM dan RI dalam kurun waktu yang cukup

lama. Namun dalam konteks sosial budaya masyarakat, tentu saja memori kolektif masyarakat terhadap konflik GAM dan RI masih teringat jelas. Namun masyarakat sipil pada saat konflik tidak menjadi sasaran dari pada anggota Tentara Negara Indonesia (TNI). Oleh karena itu, yang menjadi incaran oleh anggota TNI ialah murni masyarakat yang telah bergabung kedalam GAM dan yang dianggap telah membantu pihak GAM. Hal ini dikarenakan konflik di Aceh Jaya telah berkejolak dan anggota GAM memang telah membaca situasi untuk menyelamatkan diri ke hutan. Pada saat puncak konflik tersebut terjadi anggota GAM tidak ada yang berkeliaran di permukiman masyarakat, sehingga masyarakat hanya perlu mewaspadaai anggota TNI yang berkeliaran. Seperti yang disampaikan oleh timses PNA selaku masyarakat yang juga memiliki memori kolektif terhadap konflik GAM dan RI.

*Di wilayah kita konflik termasuk tidak terlalu parah seperti Aceh bagian Timur, karena kenapa untuk wilayah Barat ini GAM masih kurang persejataan, kemudian GAM di daerah kita juga tidak terlalu suka mencari masalah dengan aparat militer. Ditambah lagi GAM di daerah kita juga tidak bermain atau berkeliaran di dalam permukiman warga bukan seperti di wilayah lain. GAM di sini mainnya memang di hutan jadi tidak mencari masalah ke daerah masyarakat.<sup>41</sup>*

Jadi Di Aceh Jaya konflik antara GAM dan RI tersebut terlambat berkejolak, karena pada saat Daerah Operasi Militer diberlakukan semua masyarakat yang bergabung kedalam GAM langsung menyelamatkan diri ke hutan, yang tertinggal hanya masyarakat sipil biasa. Dan masyarakat sipil hanya perlu berwaspada supaya tidak dicurigai sebagai bagian dari GAM.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Timses Kecamatan Caleg PNA bapak Andi Ikhsan pada 08 Juli 2020 pukul 10:59 wib.

Berbeda dengan Aceh bagian Timur yang merupakan daerah lahirnya para pemberontak GAM. Sehingga yang menjadi incaran pusat pertama kali ialah anggota GAM Aceh bagian Timur dan masyarakat sebagai dampak kemarahan anggota keamanan terhadap anggota GAM. Namun di Aceh Jaya ada beberapa masyarakat sipil yang di duga kuat menjadi anggota GAM dan akhirnya terbunuh. Hal ini dikarenakan budaya ikut-ikutan untuk bersembunyi ke hutan dan ketika suasana merasa sedikit aman masyarakat sipil ini kembali ke rumah di desa. Oleh karena itu masyarakat sipil yang seperti ini menjadi incaran anggota TNI dan akhirnya terbunuh. Dan kasus ini pernah terjadi di Kecamatan Pasi Raya dan sampai hari ini masih terdapat tugu sebagai ingatan atas meninggalnya tujuh orang sekaligus di sebuah pondok karena dicurigai sebagai anggota GAM. Bahkan ada juga masyarakat sipil biasa yang dicurigai sebagai anggota GAM dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke hutan dari incaran aparat militer pusat. Sehingga mereka juga merasakan pedih karena merasa kelaparan tetapi untuk kembali ke permukiman masyarakat mengalami ketakutan. Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengingat tentang konflik tersebut, beliau mengatakan bahwa:

*Kami waktu itu harus berlari ke hutan karena ada beberapa kerabat saya yang memang anggota GAM sehingga aparat mengincar saya juga karena dianggap bagian dari mereka. Jadi saya harus melarikan diri ke hutan. Dan itu pengalaman buruk ya, tidak sama seperti sekarang kita jauh lebih bebas dalam menikmati kehidupan. Dulu kami harus mendengar letusan senjata, bahkan jarang makan dan tidur juga tidak enak namanya juga di hutan kan.<sup>42</sup>*

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tgk. Bakri masyarakat Desa Pasi Geulima pada 03 Juli pukul 13: 59 wib

Tetapi dalam masa konflik Aceh Jaya memang tidak sebanding dengan konflik yang terjadi di Aceh bagian timur atau sepanjang pantai Utara dengan sebutan zona merah. Di bagian Timur Aceh yang menjadi korban bukan hanya anggota GAM tetapi masyarakat sipil menjadi sasaran anggota TNI baik itu laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang diperlakukan sangat brutal dan tragis.

Pada saat konflik itu terjadi, Aceh Jaya menjadi bagian dari Barat Selatan (BarSela) yang merupakan salah satu daerah yang tidak termasuk kedalam peta yang bersandi jaring merah atau jaring maut kekejaman para aparat keamanan RI.<sup>43</sup> Walaupun tidak termasuk kedalam jaring maut sasaran anggota TNI tetapi konflik tersebut juga meninggalkan luka kepada masyarakat umumnya yang merasakan langsung kehilangan anggota keluarga yang terbunuh pada saat konflik tersebut terjadi. Banyak juga masyarakat sipil yang dipukul oleh aparat keamanan karena dianggap telah menyembunyikan anggota GAM dan memberi makan untuk anggota GAM selama konflik berlangsung. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Liza masyarakat pemilih Partai Aceh yang masih mempunyai memori kolektif tentang konflik.

*Ya konflik memang pernah terjadi dulu di daerah kami. Kalau dikatakan parah tidak juga tetapi pembunuhan itu ada juga. Bahkan saya sendiri juga langsung melihat bagaimana ada warga yang bermasalah ditembak di tanggul Teupin Ara. Kalau tidak salah saya ada 20 orang yang meninggal di sana waktu konflik.<sup>44</sup>*

---

<sup>43</sup> <https://www.kba.one/news/18-tahun-aceh-jaya-melintas-batas-darurat-militer-dan-darurat-corona/index.htm> diakses pada Juli 2020 pukul 14:14 wib

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Liza masyarakat desa Pasi Timon pada 02 Juli 2020 pukul 19:10 wib.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Darmawi masyarakat desa Pasi Geulima, bahwasanya pemukulan terhadap warga sipil itu memang ada semasa konflik tetapi jika pembunuhan yang pernah terjadi itu dilakukan penembakan terhadap Anggota GAM.

*Berbicara tentang konflik dulu ya lumayan parah karena saya melihat di kampung saya juga terjadi pemukulan terhadap warga sipil yang menjaga posko malam sekitar 12 orang yang dipukul oleh aparat. Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang dikurung di dekat masjid. Tetapi untuk penembakan itu ada juga yang meninggal tetangga kampung kita dulu di tembak seperti Jalani, Halim, Adi Pasi Pawang Tetapi mereka memang anggota GAM.<sup>45</sup>*

Jadi masyarakat Aceh Jaya secara historis juga pernah merasakan menjadi bagian dari konflik antara GAM dan RI. Memori kolektif tentang konflik tersebut masih diingat oleh sebagian masyarakat yang memang menyaksikan kekerasan pada saat itu. Bagaimana masyarakat sipil ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dan merasa terkurung di dalam rumah, dipukul bahkan ada juga yang ditembak. Tetapi dalam konteks sosial budaya, masyarakat Aceh Jaya tidak banyak yang menyaksikan kekejaman aparat keamanan seperti yang terjadi di Aceh bagian Timur. Kemudian wilayah Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah yang tidak termasuk kedalam zona merah incaran aparat keamanan. Dan gejolak konflik tersebut juga telat dirasakan oleh masyarakat bagian Aceh Jaya. Sehingga anggota GAM yang terdapat di Aceh Jaya ini telah berhasil menyelamatkan diri ke hutan walaupun ada juga yang terbunuh. Oleh karena itu dampak konfliknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat dan umumnya kekerasan dan pembunuhan itu hanya dirasakan oleh mantan eks kombatan GAM. Tetapi masyarakat Aceh Jaya

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darmawi Masyarakat Desa Pasi Geulima pada 30 Juli 2020 pukul 16:08 wib.

sampai hari ini masih ingat bagaimana konflik tersebut telah memakan banyak korban.

#### **4.3.2 Pengaruh Memori Konflik Terhadap Perolehan Suara Parlok**

Pada dasarnya Aceh Jaya merupakan salah satu daerah konflik yang berada di luar dari zona merah incaran para aparat keamanan pusat. Namun konflik yang telah terjadi di masa lalu tersebut justru terlupakan oleh masyarakat. Seperti ada semacam pelupaan terhadap memori kolektif masyarakat. Studi memori adalah sebuah dasar dalam memahami bagaimana formasi mengenai ingatan itu terbentuk, dan sekaligus menolak atau setidaknya menunda dominasi itu sehingga bisa dikatakan sebagai dimensi emansipatifnya pada sisi yang lain. Oleh sebab itu adanya relasi yang tidak berimbang mengenai bagaimana suatu formasi ingatan tersebut terbentuk, maka ingatan juga berkaitan dengan lawannya yaitu pelupaan.<sup>46</sup> Jadi ada semacam saringan, baik sengaja ataupun tidak, disadari maupun tidak, yang menyeleksi mana perlu untuk diingat dan mana yang dilupakan sebagai semacam sensor ingatan di dalam masyarakat. Sehingga pemilih tidak terlalu mengaitkan kembali antara konflik yang pernah terjadi di masalah dengan pilihan suara masyarakat untuk pemilu yang melibatkan partai lokal.

---

<sup>46</sup> G. Bankoff. Selective Memory and Collective Forgetting. *Historiography and the Philippine Centennial of 1898. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, The Philippines Historical and Social Studies* 157(2001), No:3, Leiden. Dalam konteks Indonesia, lihat juga misalnya dalam Mary S. Zurburchen. *History, Memory, and the "1965 Incident" in Indonesia. Asian Survey* , Vol. 42, No. 4 (July August 2002).

Masyarakat menyadari bahwasanya konflik tersebut pernah terjadi. Memori kolektif masyarakat terhadap konflik tersebut masih diingat sampai saat ini. Namun dalam menentukan pilihan pada pemilu tentu saja masyarakat tidak mengkaitkan kembali antara konflik dan partai lokal. Bagi masyarakat mengingat tentang konflik itu hal yang penting bagaimana penyiksaan yang telah dialami oleh sebagian masyarakat sipil maupun mantan anggota kombatan GAM. Tetapi hal tersebut tidak boleh untuk dilibatkan kedalam ranah perpolitikan saat ini. Seperti dalam sesi hasil wawancara masyarakat yang mempunyai memori kolektif terhadap konflik dengan Bapak Darmawi, beliau menyatakan bahwa:

*Saya dalam menentukan pilihan untuk pemilu DPRK 2019 kemarin murni karena saya melihat adanya sosok caleg dari PNA Irwanto NP yang menurut saya memang saya puas dengan kinerja dia walaupun dia baru sekarang menjadi caleg. Tetapi untuk kaitannya dengan konflik dulu meskipun kerabat saya ada juga yang dipukul oleh aparat tentu itu tidak boleh dikaitkan. Jadi saya pribadi melihat calegnya bukan karena dulu ada konflik.<sup>47</sup>*

Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang setiap pemilunya di kuasai oleh parlok. Ketika pemilu 2019 ke empat partai lokal seperti PA, PNA, PDA dan SIRA masih bertarung dengan partai nasional untuk tetap dapat menguasai DPRK Aceh Jaya. Eksistensi partai lokal sangat bagus di Aceh Jaya terbukti dengan 12 kursi parlok dari total 20 kursi untuk DPRK Aceh Jaya pada pemilu 2019. Masyarakat Aceh Jaya menilai turut bangga karena Aceh memiliki perbedaan dengan provinsi lain. Padahal daerah lain juga menginginkan hal yang sama seperti daerah Aceh tetapi belum mendapatkan keistimewaan tersebut.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darmawi masyarakat desa Pasi Geulima pada 30 Juli 2020 pukul 16:08 wib.

*Karena selama kita tinggal di Aceh dan sebelum adanya otonomi khusus kita masyarakat Aceh sudah dibentuk dengan beberapa parlok. Jadi selaku masyarakat Aceh otomatis kita memilih partai lokal.<sup>48</sup>*

Meskipun masyarakat menjadi bagian dari konflik GAM dan RI tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pada saat pemilu legislatif. Tetapi masyarakat merasa dengan adanya partai lokal partai lokal lebih membuat masyarakat leluasa dalam menyampaikan aspirasi ketimbang partai nasional. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam sesi wawancara yaitu dengan saudari ibu Mariani pemilih dari partai PDA. Yang mengatakan bahwasanya:

*Dampaknya mungkin dengan terpilihnya dewan dari parlok lebih leluasa untuk masyarakat ketimbang parnas karena Aceh lebih dominan memilih parlok. Ya pandangannya mungkin karena kami dulu adanya konflik jadi kami lebih percaya terhadap parlok sendiri ketimbang partai lain. Untuk parnas mungkin kami tidak terlalu mengenal orangnya dan visi misi mereka berbeda dari pendapat kami makanya kami memilih parlok karena sudah tahu orangnya.<sup>49</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang memilih partai Aceh saudari Ibu Liza yaitu masyarakat desa Pasi Timon dalam sesi wawancara:

*Kalau lihat sekarang untuk daerah lain tidak ada partai lokal cuman di daerah Aceh saja jadi kehidupan kita lebih baik apapun itu tetap beda dengan daerah lain. Apa masalah qanun, misal daerah lain gimana daerah kita gimana. Jadi lebih banyak lebihnya ketimbang daerah lain dikarenakan ada partai lokal.<sup>50</sup>*

Kemudian dari sesi wawancara dengan masyarakat lain juga mengatakan hal yang sama bahwa aspirasi masyarakat lebih mudah disampaikan.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Misbah masyarakat desa Pasi Timon pada 01 Juli 2020 pukul 13:58 wib.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mariani masyarakat Desa Padang Kleng pada 30 Juli 2020 pukul 21:41 wib

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Liza masyarakat desa Pasi Timon pada 02 Juli 2020 pukul 19:10 wib.

*Partai lokal adalah partai khusus di Aceh yang ada partai lokal. Jadi sangat membantu dengan adanya partai lokal diantara lain aspirasi masyarakat tersampaikan semenjak ada partai lokal. Berbicara layak semua layak dan mampu kalau tidak ya tidak mungkin terpilih dan menerima aspirasi per individu masyarakat tidak mungkin terwujud.<sup>51</sup>*

Selain parlok memang berbasis di wilayah Aceh dan merupakan partai lokal yang harus dikembangkan demi kemajuan masyarakat Aceh dan demi mempertahankan politik hak-hak rakyat Aceh. Masyarakat juga menilai dari siapa caleg yang diusungkan oleh partai lokal, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah seorang pemimpin yang bisa mendengar aspirasi masyarakat.

*Untuk parlok di Aceh khususnya merupakan partai daerah dan dampak yang diterima dari parlok ya untuk perubahan daerah kita karena daerah provinsi lain tidak ada parlok dan sudah selayaknya kita warga Aceh untuk memilih parlok dan kita lihat lagi siapa caleg yang bisa membawa perubahan bagi masyarakat Aceh kita ini. Jadi untuk memilih parlok tersebut kita melihat siapa pemimpin partai tersebut dan apa tujuan dan bukan dari sejarahnya.<sup>52</sup>*

Masyarakat hanya menginginkan caleg yang dapat membawa perubahan terhadap daerah Aceh. sehingga masyarakat enggan jika harus melibatkan memori kolektif terhadap konflik atau sejarah masa lalu dalam ranah pemilu untuk saat ini. Sehingga pengaruh memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terhadap perolehan suara parlok sangat minim. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum DPW PDA Aceh Jaya dalam sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa:

*Saya rasa untuk pemilu baik kemarin atau kedepan masyarakat akan lebih melihat kepada sosok figur yang diusungkan oleh parlok. Jadi sangat sedikit kemungkinan masyarakat memilih karena ingatan tentang konflik*

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tengku Bakri masyarakat Desa Pasi Geulima pada 03 Juli pukul 13:59 wib.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juli 2020 pukul 22:14 wib

*dulu. Tetapi jika untuk partai Aceh mungkin sedikit berpengaruh. Tetapi untuk PDA dan PNA saya rasa tidak.*<sup>53</sup>

Kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa program yang dirasakan oleh masyarakat sekarang walaupun partai yang terpilih tersebut parlok ataupun parnas tetapi yang menjalankan kelapangan ialah dewan. Masyarakat melihat bahwa baik parlok ataupun parnas tidak ada bedanya karena sama-sama harus bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi tergantung calegnya bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau tidak. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat.

*Di Aceh ini lebih baik umumnya memilih parlok jarang memilih partai nasional parlok maupun parnas itu sama saja untuk dewan inikan mereka memperjuangkan hak rakyat itu aja. Untuk program macam program listrik sebagian gratis dari segi pertanian walapun program pusatkan yang menjalankan kelapangan kan dewan DPRK.*<sup>54</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat lainnya. Bahwasanya parlok maupun parnas tersebut sama saja tidak ada yang membedakan kedua partai politik tersebut. Seperti dalam hasil wawancara:

*Menurut saya partai lokal sama saja dengan partai nasional. Jika partai nasional bisa menonjol maka partai lokal juga bisa menonjol.apakah ada yang membedakan keduanya? Tidak.*<sup>55</sup>

Semenjak lahirnya partai lokal di Aceh, banyak sekali perubahan yang diterima oleh masyarakat Aceh. Kita bisa melihat banyak sekali pogram yang telah dikembangkan oleh partai lokal yang sudah terealisasi. Hal ini justru membuat masyarakat merasa lebih tentram dengan adanya partai lokal. Dan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Sekum DPW PDA Aceh Jaya, Bapak Nasri Saputra pada 04 Juli 2020 pukul 10:00

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saed Abdillah masyarakat desa Teupin Ara 30 Juli 2020 pukul 16: 00 wib.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi masyarakat desa Teupin Ara 29 Juli 2020 pukul 20:00 wib

masyarakat merasa bahwa parlok ini dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya ketimbang dengan partai nasional. Bahkan masyarakat tidak segan untuk pindah ke partai nasional jika caleg dari parlok yang sudah terpilih tidak dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Masyarakat kebingungan mengungkapkan atas dasar apa parlok tersebut bisa ada di Aceh sehingga masyarakat Aceh dapat menikmati dari hasil parlok tersebut. Tidak hanya itu masyarakat menganggap partai lokal dan partai nasional itu sama tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut masyarakat yang membedakan hanya wilayah cakupan saja.

Tetapi jika nanti caleg dari parlok tidak lagi memperdulikan masyarakat. Maka masyarakat akan memilih caleg dari partai lain. Dan selama caleg dari parlok tersebut tetap mengutamakan aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan tetap mempertahankan partai lokal demi kemajuan daerah Aceh Jaya. Semua partai yang mampu menjalankan aspirasi masyarakat maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

*Harapan, lebih peduli lagi tetapi untuk dewan tidak tau mau bilang apa, tetapi jika tidak peduli lagi ya berarti tidak memilih lagi yakan. Kan iya missal kita sudah memilih dia menjadi anggota dewan tetapi tidak peduli lagi dengan kita ngapain kita pilih lagi kan.<sup>56</sup>*

Kemudian masyarakat juga sangat berharap kepada dewan yang sudah terpilih dari parlok untuk tetap mempertahankan kepercayaan supaya kedepan masyarakat tetap akan memilih partai lokal kembali.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hj. Aida masyarakat desa Cottrap pada 03 Juli 2020 pukul 15: 58 wib

*Untuk elit atau dewan parlok? Gimana ya cara mengatakannya ya semoga masih melihat lah kearah masyarakat yang sudah memilih mereka dan mereka sudah punya jabatan di dewan jangan nanti setelah mereka terpilih malah tidak peduli lagi ke masyarakat. Kadang untuk kedepan nanti masyarakat karena tidak dipedulikan malah tidak mau memilih kembali.<sup>57</sup>*

Selain itu, masyarakat kekurangan pengetahuan tentang partai lokal sehingga pemilih hanya tmengetahui jika partai lokal itu hanya partai Aceh. Tetapi untuk PNA dan PDA, para pemilih hanya mengetahui caleg yang diusungkan oleh parlok tersebut.

*Untuk lahirnya parlok saya tidak tahu tetapi saya tahu parlok sudah ada dan saya juga tidak berpatokan kepada parlok ya karena kebetulan saya dalam memilih melihat calegnya.<sup>58</sup>*

Namun setelah dilihat kembali banyak sekali masyarakat yang memang tidak paham dengan partai lokal. Padahal partai lokal tersebut sangat penting untuk diketahui bagaimana rasa cinta masyarakat terhadap parlok dan mengingat kembali bahwa bangsa Aceh pernah menjadi bagian dari penyatuan bangsa gagal yang dilakukan oleh pusat.

Partai lokal tersebut memang harus dikembangkan dan dipertahankan oleh semua masyarakat Aceh. Karena ketika parlok hilang masyarakat tidak akan dapat menikmati kembali apa yang telah didapatkan sehingga bisa seperti sekarang ini. Mengingat bahwa partai lokal ini tidak didapatkan dengan mudah dan cuma-cuma tetapi untuk memperoleh keberhasilan hari ini para pejuang rakyat Aceh pada masa konflik masih ingat sekali bagaimana gerakan tersebut telah membuat

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hj.Zainab masyarakat desa Panton pada 03 Juli 2020 pukul 17: 28 wib.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahimuddin masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juli 2020 pukul 22:00 wib.

beribu-ribu nyawa rakyat Aceh melayang hanya demi untuk mendapatkan keadilan didalam negara sendiri.

*Untuk parlok, jadi kalau sikap orang Aceh kebiasaan kita lihat, ketika tidak ada kita suka ketika ada baru sebentar sudah bosan ketika sudah tidak ada lagi nanti baru teringat kembali. Jadi harapan saya ini harus kita pelihara karena untuk kita melahirkan kembali dan meraihnya seperti ini itu tidak mudah, jika parlok kita di Aceh mendapatkan yang seperti sekarang ini dengan perjuangan yang panjang kehilangan nyawa saudara terkena tembakan dan sebagainya baru kita peduli ke parlok. Kalau bisa masyarakat tetap memelihara dan ini menjadi senjata untuk kita menghadapi pusat. Kenapa kita bisa membangun Aceh ini sedikit demi sedikit jalanlah pembangunan. Mungkin jika seumuran kalian begitu besar tahu-tahunya Aceh memang sudah begini. Kalau waktu kami masih kecil dulu bukan seperti ini, kalau pembangunan itu tidak pernah kita lihat ada di kampung-kampung. Tingkat Wc umum 1 di kampung saja itu dipikiran kami sudah besar sekali proyeknya. Padahal kalau sekarang itu menjadi uang desa. Jadi harapan semoga kita dapat mempertahankan kekuatan kita sendiri di Aceh untuk menghadapi pusat. Menghadapi bukan dalam artian bersiteru tetapi lahirnya proses anggaran dan hal lainnya.<sup>59</sup>*

Faktor lain dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap partai lokal, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat. Disini terlihat jelas arah memori kolektif masyarakat terhadap konflik tidak mengarah ke parlok, karena masyarakat melihat caleg lebih dekat dengan masyarakat. Dan ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang partai lokal tersebut justru membuat masyarakat kebingungan ketika ditanya seputar pendapat terhadap partai lokal. Masyarakat lebih mengenal calegnya jika sedang berbicara partai lokal. Sehingga masyarakat memilih sesuai kriteria kandidat bukan dilihat lagi dari sisi partai lokalnya. Sehingga hal seperti ini dapat menyebabkan masyarakat kurang terbukanya menguasai nasionalisme dalam artinya mencintai partai lokal sendiri buah

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Fraksi Partai Aceh bapak Mawardi Wahed pada 01 Juli 2020 pukul 20:17 wib.

daripada perjuangan para pejuang yang tergerak dalam GAM yang sampai hari ini masyarakat masih dapat menikmati buah hasil dari perjuangan rakyat-rakyat Aceh.

*Itu yang sebenarnya kita pernah menguasai politik pemerintahan di Aceh, sebenarnya PA bisa masuk ke ranah pendidikan untuk bagaimana kita memberikan pendidikan politik kepada anak-anak kita di sekolah, karena sampai sekarang masih ada generasi muda yang tidak tahu apa itu Mou bagaimana hasil perundingan dengan Indonesia. Sebenarnya walaupun tidak masuk ke kurikulum itu bisa diberikan pelajaran ekstrakurikuler untuk anakanak. Bagaimana tentang rencana PA kedepan. Nah itu kekurangan kita dulu setelah kita pelajari itu memang kedepan harus kita beritahu kepada generasi muda kita, kita buat diklat dan pelatihan-pelatihan di partai. Pendidikan politik itu dulu kurang, apakah mungkin dulu karena PA tidak bagus-bagusnya orang mengelola, ilmu semua ada tetapi pengalaman perjalanan di lapangan.<sup>60</sup>*

Hal demikian juga disampaikan oleh Sekretaris Umum DPW PDA dalam sesi wawancara, pihak partai mengakui adanya *miss* komunikasi antara pengurus dan masyarakat.

*Ada miss communication dalam mensosialisaikan parlok kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa kemampuan pengurus kita yang terbatas dan dalam mempertahankan kursi di sana kurang berkomunikasi dan itu menjadi PR buat kita.<sup>61</sup>*

Dan kurangnya kemampuan pengurus dalam memberikan sosialisasi politik. Seharusnya Partai politik dapat melaksanakan fungsi partai dengan baik. Salah satu fungsi yang penting merupakan pendidikan politik dan sosialisasi politik bagi masyarakat, pendidikan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai khususnya. Dalam hal ini, apabila suatu partai politik telah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan pengurus harian Partai Aceh Bapak Tarmizi atau Geuchik Angen pada 30 Juni 2020 pukul 10:04 wib

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan sekum DPW PDA Aceh Jaya, bapak Nasri Saputra pada 04 Juli 2020 pukul 10:00 wib

melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik dan sosialisasi politik maka masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya Aceh untuk mempertahankan partai lokal sendiri. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap parlok akan membuat masyarakat memilih berdasarkan sosok figur dan program yang ditawarkan oleh caleg sehingga mengabaikan peranan parlok. Dan hal ini akan menyebabkan masyarakat terjebak dalam pemilih yang berdasarkan kriteria caleg yang menjadi pilihan masyarakat terlepas dari masyarakat tidak akan melihat partai lokal sebagai pengusungnya.

Dan sudah seharusnya masyarakat Aceh mengetahui dan memelihara parlok, untuk tetap memberikan kesempatan kepada parlok ini menjadi wakil penyampai aspirasi masyarakat. Partai lokal ini menjadi jalan untuk masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelum adanya partai lokal. Partai lokal menjadi jalan kekuatan untuk Aceh dalam menghadapi pusat. Dan jalan untuk tetap dapat menerima outsus yang telah diperjuangkan daripada provinsi lainnya.

Maka secara umum masyarakat memang mengetahui konflik yang pernah terjadi di Aceh. Bahkan masyarakat Aceh Jaya juga ikut merasakan dampak dari konflik GAM dan RI tersebut. Memori kolektif masyarakat Aceh Jaya memang tidak seperti yang dirasakan oleh masyarakat Aceh bagian Timur. Dan dampak trauma dari konflik yang dirasakan juga berbeda-beda, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Aceh Jaya mendapatkan dampak yang besar dari konflik tersebut. Meskipun masyarakat mengingat tentang konflik yang pernah terjadi di masa lalu. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat Aceh Jaya dalam

memberikan suara terhadap partai lokal. Masyarakat tidak mengkaitkan kembali antara konflik yang pernah terjadi di masalalu tetapi untuk saat ini masyarakat lebih fokus kedepan terhadap pemimpin yang bisa membawa perubahan terhadap Aceh Jaya.

#### **4.3.3 Perilaku Memilih: Kekuatan Figur Caleg dan Bantuan Sosial**

Pada umumnya perilaku memilih masyarakat dalam pemilu itu berbeda-beda. Masyarakat mempunyai alasan tersendiri apakah itu dilihat dari kecintaan pemilih terhadap parlok, menilai personal kandidat, melihat keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh pemilih maupun melihat kinerja dari parlok atau kandidatnya. Namun dalam penelitian ini perilaku memilih masyarakat mengarah kepada pendekatan psikologi yang dilakukan oleh caleg terhadap masyarakat. Artinya masyarakat melihat ke personal caleg bukan personal parlok.

Ada beberapa aspek pemilih menjatuhkan pilihannya dari pendekatan psikologis, yaitu ketertarikan seseorang dengan partai-partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu, orientasi seseorang terhadap isu kandidat. Identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Sementara evaluasi terhadap kandidat melihat dilihat karena sejarah yang telah diukir atau masa lalu kandidat.<sup>62</sup> Namun untuk dinamika politik

---

<sup>62</sup> Dwidyawati Esther Mopeng, *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)* Jurnal Politico, Vol 4, No 2 2015. hlm 9.

sekarang ini, figur kandidat dianggap paling memiliki ketertarikan dan sosok idaman bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini masyarakat lebih mempengaruhi psikologis terhadap pemilih.

Maka dalam penelitian ini ditinjau dari pendekatan psikologis terdapat dua perilaku memilih masyarakat di kabupaten Aceh Jaya. Pertama melihat kekuatan Figur Caleg dan kedua dampak yang diterima masyarakat semenjak adanya parlok yaitu adanya bantuan sosial. Dilihat dari perilaku memilih masyarakat Aceh Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa memori masa konflik di masyarakat Aceh Jaya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih termasuk perolehan suara partai lokal. Tetapi pada pileg DPRK Aceh Jaya 2019 terdapat faktor kebetulan suara parlok lebih banyak dikarenakan adanya sosok figur caleg dan bantuan soal.

#### **4.3.3.1. Kekuatan Figur Caleg**

Calon Legislatif (caleg) merupakan sosok yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat selain daripada partai politik. Termasuk perilaku Masyarakat Aceh Jaya yang masih memberikan kepercayaan kepada partai lokal.

Masyarakat mengetahui jika parlok masih dapat menguasai DPRK Aceh Jaya maka dampak yang diterima oleh masyarakat akan lebih banyak. Bukan hanya caleg yang mencari jalan menuju ke parlemen melalui partai lokal, namun pemilih juga melihat pendekatan yang dilakukan oleh caleg tersebut terhadap masyarakat baik sebelum dan sesudah terpilih. Ketika masyarakat meminta bantuan kepada caleg parlok tersebut sudah bersedia membantu apa yang telah

disampaikan oleh masyarakat untuk sekarang ini karena dulu masyarakat tidak merasakan demikian. Sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk memilih pemimpin yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam hasil wawancara:

*Ya terpilih dia ya ada kayak uang dan sekarang juga lagi proses meminta bantuan lain akan bersedia katanya. Ya peduli terhadap rakyat kalau misalkan ada apa katanya disuruh pergi kekantor katanya. Dan dulu sebelum ada PA tidak ada yang demikian, seperti dulu kita memilih demokrat, Golkar.<sup>63</sup>*

Hal yang sama kemudian juga disampaikan oleh masyarakat pemilih partai PNA. Bahwasanya Caleg PNA tersebut memang pernah memberikan bantuan kepada masyarakat di desanya.

*Ada yang saya terima, tetapi saya tidak tahu apakah itu bantuan dari dinas atau pribadi, tetapi saya melihat adalah dampak sedikit untuk masyarakat. Dan juga bentuk usaha yang diberikan seperti modal dagang.<sup>64</sup>*

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh pemilih dari partai Aceh. Bahwasanya terlepas itu program pusat ataupun bukan tetapi masyarakat pernah meminta bantuan untuk bidang pertanian seperti bibit untuk pertanian. Hal ini disampaikan dalam sesi wawancara:

*Kalau berbicara dampak, yang sudah saya lihat bahwa ada bantuan seperti bibitan untuk pertanian, seperti bibit jagung, padi dan sebagainya. Adalah untuk masyarakat kalau saya lihat.<sup>65</sup>*

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jufriani masyarakat desa Teupin Asan pada 03 Juli 2020 pukul 12:00 wib.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Andian YS masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juli 2020 pukul 20:16 wib.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Umar Dani masyarakat desa Gampong Baro pada 01 Juli 2020 pukul 12:23 wib.

Pendekatan yang dilakukan oleh caleg dari parlok membawa pengaruh baik untuk masyarakat. Sehingga masyarakat juga menilai caleg parlok yang sudah terpilih lebih pro terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat.

*Partai lokal lebih bagus ketimbang partai nasional karena mudah dihubungi dan lebih pro rakyat dan banyak pendekatan dengan masyarakat.<sup>66</sup>*

Sehingga masyarakat lebih melihat lagi partai lokal tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang bertanggungjawab. Bahkan bukan hanya masyarakat yang melihat sisi daripada calegnya tetapi caleg juga melihat situasi untuk sekarang kepercayaan masyarakat untuk partai lokal lebih besar ketimbang partai nasional. Sehingga caleg mencari jalan menuju ke parlemen melalui partai lokal untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh anggota dewan Fraksi PDA dalam sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa:

*Itulah dari awal kita mengatakan khusus di kabupaten Aceh Jaya ini masih dipercaya oleh masyarakat jadi tergantung daerah kemudian tergantung kepada pengurus juga. Untuk daerah kita insya Allah masih kita lihat masih ada kepercayaan masyarakat terhadap parlok. Karena wilayah Aceh Jaya ini masih bernuansa lokal, di parlemen juga lokal ketimbang nasional. Saya di partai PDA ini hampir 10 tahun karena sudah 2 periode<sup>67</sup>.*

Kemudian ditambah dengan figur caleg yang memiliki sikap berwibawa di depan masyarakat menjadi penilaian positif untuk perolehan suara partai lokal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa Pasi Geulima yang mengatakan bahwa:

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tgk. Rusli masyarakat desa Pasi Timon pada 01 Juli 2020 pukul 13:35 wib.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Fraksi PDA H. Dasril A Rahman.IB pada 03 Juli 2020 pukul 19:44 wib.

*Ya jika untuk orangnya yang kita lihat sekarang juga setelah terpilih menjadi anggota dewan lebih Nampak lagi wibawanya, sedikit berubah dari periode sebelumnya ya sosialnya ada lah.<sup>68</sup>*

Dalam memilih sebuah partai politik, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. Masyarakat cenderung melihat kemampuan kinerja dari caleg serta program yang telah dipaparkan semasa kampanye. Perilaku pemilih pada masa awal berdirinya partai lokal di Aceh memang terlihat jelas masyarakat sangat mencintai parlok terkhusus partai Aceh. Namun sekarang parlok sudah mulai menyebar dan masyarakat dalam menentukan pilihannya tidak lagi mengkaitkan dengan memori kolektif masyarakat pada masa konflik. Walaupun partai lokal tersebut lahir karena konflik dan perjuangan yang dibangun oleh mantan eks kombatan. Hal ini terlihat jelas ketika masyarakat Aceh Jaya hanya melihat sisi calegnya tetapi tidak lagi melihat bagaimana perjuangan rakyat Aceh dulu dalam melahirkan partai lokal di Aceh. Oleh karena itu, masyarakat sekarang lebih melihat kepada pemimpin daripada partai lokal. Menurut masyarakat, Aceh Jaya membutuhkan seorang pemimpin yang mendengar aspirasi masyarakat dan dapat merealisasikan janji-janji selama kampanye. Jika caleg tersebut dapat bertanggungjawab maka masyarakat akan memilih caleg tersebut. Jadi partai lokal bukanlah patokan untuk masyarakat memberi suara pada pemilu, tetapi sosok figur caleg menjadi penilaian pertama untuk pemilih memberikan satu suara pada saat pemilu.

*Ya sudah jelas yang memilih rakyat sendiri dan rakyat pasti sudah mengenal caleg yang sudah terpilih apalagi yang terpilih itu merupakan partai lokal sesuai dengan kriteria masyarakat itu sendiri. Tergantung*

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin masyarakat desa Pasi Geulima pada 02 Juli 2020 pukul 18:13 wib.

*calegnya sih bukan tergantung partainya dikarenakan disini dimana seseorang yang memimpin itu baik berarti itulah yang kita pilih bukan tergantung partainya. Jadi kalau partainya baik tetapi tidak baik orang didalamnya. Apakah layak memimpin jadikan kita disini butuh pemimpin bukan sekedar lambang partai tetapi juga pemimpin yang bisa memimpin kriteria masyarakat dan dapat memenuhi apa yang telah mereka janjikan tetapi saat mereka sudah menang jadi caleg mereka masih bisa menyesuaikan apa yang telah mereka janjikan mereka lakukan.<sup>69</sup>*

Masyarakat bahkan lebih banyak menilai personal caleg ketimbang partai lokal. Salah satunya menilai keseharian caleg dan juga program telah ditawarkan kepada masyarakat selama proses kampanye seperti yang disampaikan oleh masyarakat pemilih parlok PNA dalam sesi wawancara. Masyarakat tersebut mengatakan bahwa:

*Selaku pribadi saya ini, beliau caleg yang baik, punya jiwa sosial seperti yang tertulis di pamphlet dan spanduk sosial tegas dan intelektual. Kita lihat segi caleg sangat layak menjadi dewan dilihat dari segi, pertama pendidikan, kemudian seperti yang saya bilang tadi bermasyarakat, cerdas. Pokoknya dewan ini menampilkan yang baik-baiklah. Dan saya memilih ikhlas tanpa diimingkan apapun, Cuma saya menyukai program dari beliau. Salah satu program yang sudah terealisasi yaitu pemberdayaan masyarakat seperti menghidupkan kembali kelompok jagung dalam pertanian, dan peternakan juga. Itu yang sudah berjalan<sup>70</sup>*

Kemudian hal yang sama juga dinilai oleh masyarakat tentang personal figur caleg dalam sesi wawancara. Masyarakat mengatakan bahwa:

*Dampak yang saya terima memang bukan sogokan tetapi merupakan sumbangan dari dia itu ada. Dan itu setelah terpilih dia kasih bukan hanya kepada saya tetapi untuk masyarakat lain juga demikian. Dan saya juga mengingat dan menimbang dia merupakan putra daerah kita sendiri. Karena baik partai nasional maupun parlok ini sama saja.<sup>71</sup>*

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Nova Aulia masyarakat desa Pasi Geulima pada 30 Juni 2020 pukul 17:41 wib.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juli 2020 pukul 20:00 wib.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darmawi masyarakat desa Pasi Geulima pada 30 Juli 2020 pukul 16:08 wib.

Kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap caleg tersebut juga akan berpengaruh kepada suara partai lokal. Partai lokal tentu harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat bertahan di parlemen. Dan dapat bertanggungjawab dengan merealisasikan janji-janji semasa kampanye. Sehingga setiap pemilu partai lokal yang ada di Aceh tidak akan kehilangan suara dan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Karena partai lokal merupakan salah satu bentuk hasil dari perundingan antara RI dan GAM dalam memperjuangkan hak rakyat Aceh.

Pelaksanaan pemilu tidak bisa dipisahkan oleh pengaruh kedua elemen penting dalam pemilu yaitu partai politik dan caleg atau kandidat. Selain dilihat dari partai politik, figur seorang caleg juga sangat memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Kemampuan komunikasi politik yang baik yang disampaikan oleh caleg sangat berpengaruh terhadap partai politik untuk memperoleh suara dari masyarakat. Partai politik ketika bertarung pada pemilu selalu mengutamakan caleg yang berkualitas dan punya nilai jual di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari popularitas caleg yang diusungkan oleh partai lokal mendapatkan nilai positif baik dari masyarakat maupun dari pihak partai pengusung caleg tersebut. Dari ketiga caleg parlok di dapil 2 Kabupaten Aceh Jaya memang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Figur caleg-caleg yang sudah terpilih tersebut bukan hanya diperlihatkan ketika pemilu saja, tetapi jauh sebelum adanya pemilu 2019 masyarakat sudah mengenal caleg yang sudah terpilih perwakilan dari parlok. Sehingga hal ini menjadi nilai yang sangat baik dari caleg tersebut untuk suara parlok. Kedekatan emosional yang dilihat dari kinerja caleg

dari parlok ini memang sudah layak menjadi pilihan masyarakat. Berikut ini dapat dilihat hasil wawancara dengan masyarakat yang mengenal caleg yang sudah terpilih.

*Jadi begini karena caleg partai lokal tersebut merupakan orang asli orang desa ini dan cara kerjanya kita sudah mengetahui, dan sebelum dia menjadi caleg kita sudah kenal dengan orangnya. Makanya kami sangat berharap dia mau mencalonkan diri sebagai caleg. Harapan memilih parlok seperti yang saya bilang tadi kita lihat calegnya, sekarang kita bukan memilih partai, kalau partai itu sama semua tetapi yang harus kita lihat yaitu calegnya yang duduk di parlemen apakah ada memperjuangkan rakyat atau tidak dan membantu rakyat, jika tidak membantu ngapain kita pilih. Maka dari caleg PNA ini sudah terlihat membantu orang-orang.<sup>72</sup>*

Masyarakat memilih parlok melihat seberapa pedulinya caleg parlok terhadap masyarakat, Usaha caleg untuk meraih kemenangan dan menjadi pemimpin harus diiringi oleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kunci utama setiap caleg untuk bisa memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan adalah kepercayaan. Perilaku masyarakat memilih parlok tersebut disamping karena terdapat ikatan kekerabatan emosional personal caleg, terdapat juga bukti kinerja caleg yang sudah terpilih. Artinya kinerja caleg tersebut berdampak bukan hanya kepada individual tetapi menyeluruh kepada masyarakat. Namun yang didapatkan masyarakat saat ini merupakan hasil dari kinerja caleg-caleg yang terpilih dari partai lokal. Makanya tidak heran jika dilihat perilaku memilih masyarakat lebih mengutamakan kandidat partai lokal. Masyarakat hanya memilih yang peduli terhadap rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Terlebih masyarakat sudah menilai caleg-caleg yang akan maju ke parlemen sebelum terpilih. Meskipun caleg memiliki uang yang banyak jika tidak

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahimudin masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juli 2020 pukul 22:00 wib.

punya rasa sosial yang tinggi, ramah terhadap masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih caleg yang tidak mengingat terhadap masyarakat.

Kemudian hal tersebut memang dibenarkan oleh pengurus partai PNA, bahwasanya caleg yang diusulkan tersebut memang caleg yang sudah dikenal oleh publik dan sangat terbuka terhadap masyarakat. Sehingga pengurus partai juga tidak ragu dalam mengusung caleg tersebut untuk maju ke parlemen.

*Caleg yang diusulkan tersebut memenuhi kriteria caleg yang memenuhi syarat dan mampu. Kemudian menurut hasil survey caleg tersebut memang punya nilai jual di masyarakat. Elektabilitas caleg yang terpilih tersebut nampak di dalam masyarakat.<sup>73</sup>*

Ditambah dengan permintaan masyarakat yang sebelumnya juga sudah mendapatkan dukungan untuk figur caleg fraksi PNA tersebut untuk menjadi anggota legislatif. Seperti yang telah disampaikan oleh timses kecamatan Caleg PNA dalam sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa:

*Ya kalau dari kriteria memang yang pertama sudah layak menjadi anggota dewan sudah memenuhi syarat. Yang kedua karena permintaan masyarakat lebih mendekati ke dia ketimbang yang lain sih.<sup>74</sup>*

Ini menjadi babak baru untuk partai PNA, karena pemilu legislatif 2019 ini dapat meraih 3 kursi di parlemen. Memang ini tidak mudah untuk pengurus partai dan Kandidat yang di usungkan dalam meraih suara tersebut. Dan tidak terlepas juga dari kebiasaan sosial yang tinggi dari caleg, sehingga masyarakat banyak lebih mengenal caleg yang dia pilih ketimbang partai pengusungnya.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan pengurus harian DPW PNA Aceh Jaya bapak Muhammad Qadar atau lem Muhammad pada 27 Juni 2020 pukul 20:11 wib.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Timses Kecamatan Caleg PNA bapak Andi Ikhsan pada 08 Juli 2020 pukul 10: 59 wib.

Tidak hanya PNA popularitas caleg yang diusungkan untuk pemilu legislatif DPRK Aceh Jaya pada 2019 yang mendapatkan respon positif dari masyarakat, tetapi PA dan PDA juga mempunyai caleg yang berkualitas dan punya rasa kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil 2 periodenya caleg PA dan PDA menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Jaya. Kedua caleg yang sudah terpilih tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mewakili masyarakat berada di parlemen.

Kemudian dari pihak pengurus partai baik Partai Aceh maupun PDA juga membenarkan hal tersebut. Bahwasanya untuk kedua caleg tersebut memang menjadi kepercayaan bagi masyarakat yang memilih untuk kedua periode masa jabatan di parlemen. Bukan hanya ketika masa kampanye dikenal oleh masyarakat tetapi ketika sudah terpilih. Para dewan ini masih mempunyai norma baik yang dinampakkan baik untuk masyarakat maupun tim yang telah membantu sampai terpilih ke parlemen.

*Menurut kita baca keadaan dan situasi sekarang ini, begini jadi pak Mawardi Wahed tersebut mempunyai jiwa sosial yang tinggi, baik kerumah kita atau berjumpa di jalan ada basa basi. Dan untuk timses kecamatan adalah pemberian tidak pelit ketimsesnya. Ketika beliau uang pun ada.<sup>75</sup>*

Elektabilitas yang terdapat dalam diri caleg dari parlok tersebut memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh pengurus harian Fraksi PA dalam sesi wawancara:

*Kita melihat kapabilitas dan elektabilitas didalam berpolitik ada beberapa di dapil Teunom dan Pasi Raya elektabilitas Pak Mawardi Wahed*

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan ketua DPC Partai Aceh bapak Tengku Rasyidin pada 29 Juni 2020 pukul 17:03 wib.

*memang diatas rata-rata caleg yang lain ada Sunardi, Ainun. Mungkin dari partai memang mempercayakan beliau adalah orangnya tergantung kepada masyarakat memilih karena pak mawardi wahed mewakili Pasi Raya orang pasi Raya tetap memperjuangkan pak Mawardi Wahed. Jadi dari jatah 4 kursi untuk dapil 2 PA mendapatkan 1 kursi. Karena beberapa alasan dan pendapatan merebut suara hati masyarakat mungkin itu yang dapat dipercaya.<sup>76</sup>*

Selain dari figur caleg PA, pengurus dari fraksi Aceh sekretaris Umum fraksi PDA juga mengatakan hal serupa, bahwasanya caleg yang diusung oleh PDA punya figur yang bagus dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat dengan ditambah sudah dua kali periode menduduki masa jabatan di DPRK Aceh Jaya.

*Sebenarnya jika berbicara dewan yang sudah terpilih dari fraksi PDA yaitu H.Dasril kita lumrah saja, karena H.Dasril itu punya kemampuan. Pertama beliau mempunyai kemampuan kekeluargaan, dan juga punya kemampuan komunikasi politik yang baik untuk 2 periode yang sudah terpilih yaitu periode 2014-2019 dan periode kedua yaitu 2019-2024.<sup>77</sup>*

Sebelum menjadi caleg jiwa sosial yang dibangun oleh caleg terhadap masyarakat itu sudah terlihat jelas. Jadi walaupun sudah terpilih caleg tersebut tetap masih peduli terhadap masyarakat. Kemudian caleg yang terpilih tersebut memang sudah mempunyai keluarga terdekat yang bisa di percaya dalam membantunya untuk menuju ke parlemen. Jadi ada ikatan kekeluargaan dan pendekatan dengan masyarakat tersebut membuat caleg dari parlok mendapatkan suara lebih banyak. Dan seperti sebagian dana aspirasi dewan memang diberikan kepada masyarakat dan tim yang telah membantu caleg dari parlok ini untuk bisa menduduki DPRK Aceh Jaya. Ini juga disampaikan oleh caleg dari parlok yang sudah terpilih dalam sesi wawancara.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan pengurus harian DPW Fraksi Partai Aceh bidang hukum dan politik bapak Tarmizi atau Geuchik Angen pada 30 Juni 2020 pukul 10:04 wib.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Sekum DPW PDA Aceh Jaya bapak Nasri Saputra pada 04 Juli 2020 pukul 11:00 wib.

*Harapan saya ya yang terbaiklah ya untuk masyarakat, mungkin bukan parlok saja tetapi parnas juga harus ikut untuk ambil andil menyukseskan visi misi yang telah dituangkan di partai masing-masing. Misalnya di sosial kita mengerakkan kemasyarakatan, saweu gampong, dan juga melakukan risert dan mengajak warga berkumpul kumpul nah disitu nanti kami ambil isu-isu dan keinginan masyarakat sendiri. Apa yang harus dibuat kedepan apa yang harus direncanakan kedepan kami tamping Sosialisasi politik, saya setahun 2 kali sosialisasi politik risert setelah selesai sidang paripurna saya buat riset depan rumah saya panggil perwakilan dari kampung-kampung semua datang kesini karena saya ingin mendengar langsung uneg-uneg mereka apa yang belum ditampung oleh pemerintah dan mereka butuhkan.<sup>78</sup>*

Jadi secara tidak langsung caleg tersebut memang sudah dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang yang punya sikap kepedulian tinggi terhadap masyarakatnya, baik sebelum menjadi caleg ataupun setelah menjadi caleg yang terpilih ke parlemen. Jadi tidak heran ketika masyarakat lebih mengenal calegnya ketimbang partai yang pengusungnya. Karena masyarakat melihat kepribadian baik dan punya jiwa sosial tinggi dari si kandidat tersebut. Jiwa sosial yang dibangun oleh caleg tersebut lebih bermasyarakat.

*Tidak lebih, jadi saya punya motto, jadi motto saya yaitu mengutamakan rakyat. Jadi sebelum pileg berlangsung saya mulai membantu masyarakat, membawa masyarakat ke rumah sakit dan langsung terjun ke lokasi.<sup>79</sup>*

Jelas terlihat adanya jiwa sosial yang tinggi juga dari caleg parlok terhadap masyarakat. Kinerja caleg yang sudah terpilih tersebut memang sudah dikenal jauh sebelum pileg 2019 berlangsung. Ini menjadi strategi pertama yang dilakukan oleh caleg parlok untuk menarik perhatian masyarakat. Ditambah dengan strategi caleg untuk pemilu legislatif DPRK Aceh Jaya pada periode 2019 yang menggunakan strategi *door to door*. Jadi masyarakat sudah pasti mengenal

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan dewan partai PNA bapak Irwanto.NP. pada 03 Juli 2020 pukul 20: 50 wib.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Fraksi PNA Bapak Irwanto NP pada 03 Juli 2020 pukul 20:50 wib.

calegnya langsung ketimbang partai karena pemilu legislatif 2019 di Aceh Jaya tidak menggunakan kampanye terbuka.

Terutama melihat untuk caleg terpilih dari fraksi PA dan PDA tersebut sudah 2 kali memegang periode sebagai perwakilan masyarakat di DPRK Aceh Jaya. Jadi untuk pemilih sebelumnya telah memilih kandidat tersebut selama periode sebelumnya melakukan pendekatan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui timsesnya. Maka lebih mudah lagi untuk kedua caleg terpilih tersebut meraih suara di pemilu legislatif 2019. Karena selama periode sebelumnya caleg-caleg ini tetap menampakkan kedekatannya dengan masyarakat walaupun hal tersebut bukan ikatan kekerabatan. Tetapi mengingat bahwa masyarakat telah membantu selama masa pemilihan. Jadi kedekatan tersebut terpelihara oleh caleg dan masyarakat sampai periode kedua ini. Masyarakat masih bisa menaruh harapan dan kepercayaan dari caleg perwakilan dari fraksi partai lokal untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal penting yang diperhatikan oleh caleg pada tahapan pendekatan dengan masyarakat yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan dengan tingkat pemahaman masyarakat pemilih. Untuk mengenali masyarakat pemilih, kontestan bisa melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pemilih, agar memudahkan caleg dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilih. Hal ini biasanya dilakukan oleh semua caleg terkhusus kepada caleg yang telah memegang 2 periode jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Jaya. Pemilihan pertama menjadi jalan baru untuk tetap melakukan pendekatan untuk pemilu periode kedua dalam

mendekati masyarakat. Masyarakat akan melihat kepedulian caleg terhadap pemilih yang sudah memilihnya pada pemilu legislatif periode sebelumnya.

*Berbeda, karena periode pertama itu kita belum menjadi anggota dewan strateginya itu lebih kearah karena teman-teman kita memang mengharapkan kita untuk maju menjadi caleg maka betul-betul dibantu. Tetapi untuk strategi kedua ini yang pertama kita ada berbuat semasa periode pertama. Jadi ketika kita mengajak kembali orang yang dulu sudah memilih kita atau tim kita yang sudah bekerjasama untuk periode lalu, maka dia tidak akan membantah untuk mengatakan tidak mau, karena kita juga peduli dengan dia dan dia juga jangan malu dengan pemilih yang dia ajak untuk membantu kita itu kan tergantung kita sendiri. Mungkin nanti kita tidak pernah peduli, misal kalau kita di dewan ada pikir aspirasi main kasih ke saudara sendiri itu tidak akan mau lagi dibantu sama orang. Kan ada yang lebih senior seperti di dapil kita di dewan ini tahu-tahunya sudah tidak terpilih lagi jadi itu tergantung dengan pendekatan kita dengan masyarakat.<sup>80</sup>*

Pendekatan yang dilakukan oleh caleg parlok yang sudah terpilih tersebut bukan hanya menjelang pemilu tetapi jauh sebelum pemilu dan juga setelah caleg-caleg tersebut terpilih pendekatan dengan masyarakat tetap masih berlangsung dan tidak terputus hanya setelah pemilihan saja. Artinya caleg yang sudah terpilih tersebut merawat kembali pendekatan yang sebelumnya didapatkan dengan baik dan mampu terpilih sampai pemilu periode kedua ini.

*Untuk sementara ini sangat puas karena mereka juga sudah 2 periode kinerjanya sudah nampak untuk periode lalu dan untuk saat ini bisa kita lihat kinerjanya mereka belum ada masalah di masyarakat. Ya seperti yang sudah kita bilang tadi gimana ya dengan masyarakat lebih baik, bantuan pun untuk kita mintak lebih mudah apalagi memang orang daerah kita sendiri walaupun bukan orang kampong kita tetapi orang yang kita kenal seperti tetangga kampong.<sup>81</sup>*

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Dewan Fraksi PA Bapak Mawardi Wahed pada 01 Juli 2020 pukul 20:17 wib

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan ibu liza masyarakat Desa Pasi Timon pada 02 Juli 2020 pukul 19:10 wib.

Jadi terdapat perilaku memilih masyarakat Aceh Jaya yang lebih menilai calegnya dikarenakan masyarakat mengenal caleg tersebut, dan masyarakat menyukai program-program yang telah disampaikan semasa kampanye. Pendekatan yang dilakukan caleg terhadap masyarakat mendapat nilai positif karena masyarakat menganggap caleg yang sudah terpilih tersebut masih peduli dengan masyarakat. Sehingga ada strategi politik yang kuat dari sang caleg tersebut dalam mengambil suara masyarakat. Bukan dengan menjual isu tentang apa yang telah terjadi dimasa lalu tetapi lebih kepada program yang ditawarkan oleh sang caleg ketika mencalonkan diri sebagai caleg.

#### **4.3.3.2. Bantuan Sosial**

Partai Lokal yang berbasis di wilayah Aceh ini telah memberikan dampak yang sangat baik untuk masyarakat, dengan hadir partai lokal masyarakat merasa sangat terbantu. Dan terutama parlok telah memenuhi salah satu fungsi partai dengan baik yaitu sebagai penyampai aspirasi. Sehingga masyarakat merasa jika meminta bantuan kepada caleg parlok lebih tersampaikan. Seperti yang terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

*Jika dampak yang diterima itu banyak sekali seperti bantuan untuk anak sekolah itu dari partai Aceh anak yatim dan mantan GAM itu juga dari PA pokoknya banyak ya seperti meratakan fakir miskin bantuan kebun karet kebun sawit, banyak lah membantu.*<sup>82</sup>

Masyarakat Aceh Jaya melihat dengan adanya partai lokal, Aceh Jaya lebih banyak mendapatkan bantuan untuk masyarakat di desa-desa daripada pemilu sebelum lahirnya parlok di Aceh. Partai lokal telah memberi sumbangsi

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan bapak tengku Rusli masyarakat desa Pasi Timon pada 01 Juli 2020 pukul 13.35

yang sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Walaupun pasca pemilu pertama masyarakat dihadapkan dengan kurang kepercayaan terhadap partai lokal terkhusus Partai Aceh karena hanya mementingkan kelompok sendiri.

*Harapan saya dengan memilih parlok daerah Aceh sendiri semakin berkembang apalagi kita kan ada qanun istimewa untuk daerah Aceh kita sendiri. Jadi dimana ada parlok sehingga sangat mendukung untuk perkembangan Aceh dan dapat membasmi kemiskinan pada rakyat Aceh, sehingga semua yang rakyat Aceh rasakan yang tidak layak lagi seperti rumah-rumah terpenuhi dengan adanya parlok.<sup>83</sup>*

Kemudian banyak sekali harapan masyarakat dengan memilih parlok itu seperti hadirnya bantuan-bantuan kepada masyarakat. Dan sudah terlihat jelas dengan adanya parlok bantuan dari pemerintah untuk masyarakat tidak diragukan lagi. Artinya caleg partai lokal memang benar-benar menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendengar keluhan masyarakat. Bantuan yang diterima semenjak adanya partai lokal yaitu Seperti pembangunan jalan, pemberian rumah kepada fakir miskin, memberikan tunjangan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa setiap setahun sekali dan juga beasiswa untuk anak yatim di dayah-dayah. Kemudian terdapat pogram listrik gratis. Dan juga terdapat pogram untuk pertanian seperti bibitan jagung dan lain sebagainya.

*Dampaknya banyak untuk masyarakat seperti membantu anak yatim yang di Dayah.<sup>84</sup>*

Masyarakat merasa semenjak adanya partai lokal ini, masyarakat lebih banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Artinya bantuan yang diberikan tersebut telah memberi warna baru bagi masyarakat. Sebelumnya di desa-desa

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Nova Aulia Masyarakat Desa Pasi Geulima pada pada 30 Juni 2020 pukul 17:41 wib.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Hj.Zainab Masyarakat Desa Panton pada 03 Juli 2020 pukul 17:28 wib.

tidak ada pembangunan justru dengan adanya parlok sudah terdapat pembangunan disetiap desa.

*Ya semenjak ada partai lokal bantuan lebih banyak, namun untuk pemilu 2019 belum terlalu banyak tapi adalah untuk kampung sendiri sudah menerima dana dari aspirasi masyarakat seperti sekarang pemberian kursi untuk kenduri kuburan.<sup>85</sup>*

Yang terlihat memang partai politik pro rakyat dari segi bantuan yang telah banyak diterima oleh masyarakat. Banyak pembangunan semenjak adanya partai lokal di Aceh. Sehingga partai lokal ini telah membantu masyarakat terkhusus untuk masyarakat di kabupaten Aceh Jaya.

*Untuk pogram gampong ada seperti jalan, lapangan voli untuk pemuda dulu ada, tetapi untuk sementara belum ada karena masih baru mungkin ya. Masa kampanye, ya masih bersilahturahmi dengan keluarga kami tetapi untuk pemberian uang tidak ada karena selama pemilu 2019 belum jumpa langsung dengan saya. Ya yang sudah terpilih dewan dari parlok selalu memperjuangkan hak masyarakat peduli lah dengan masyarakat dengan desa bukan untuk pribadi, pokoknya masih mendengar aspirasi masyarakat seperti periode sebelumnya.<sup>86</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh timses Partai Aceh bahwasanya di daerah yang mayoritasnya dulu adalah kemenangan Partai Aceh lebih banyak bantuan yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan adanya partai lokal masyarakat bisa menikmati hasilnya sekarang.

*Jadi kalau kami ini dari pihak partai ingin memajukan partai lokal, karena kenapa kita bisa melihat termasuk bantuan dari pemerintah sudah banyak sekali membantu masyarakat walaupun banyak cabang yang dipahami oleh pemerintah. Dulu sebelum ada parlok tidak pernah kita lihat satu-satu desa diberikan rumah lima perdesa dalam satu tahun yang mendapatkan bantuan. Mau bilang apapun, tingkat orangtua kita ini*

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan ibu Henni Kimalis masyarakat Desa Teupin Asan pada 03 Juli 2020 pukul 20:26 wib.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saed Humairi masyarakat desa Pasi Geulima pada 03 Juli 2020 pukul 20:26 wib.

*belum pernah dibantu, sebelum tahun 2000 kita tidak pernah mendapatkan bantuan. Sebelum lahirnya PA kita belum pernah mendapatkan bantuan. Ketika partai Aceh ini lahir baru kita mendapatkan bantuan walaupun banyak cabang seperti PKH dan lain-lain. Sekarang politik berbeda nama politik dimasukkan kesemua lini cabang. Padahal yang melahirkan dulu cuma partai lokal. Kalau bukan partai lokal tidak akan ada.<sup>87</sup>*

Kepercayaan yang baik dari masyarakat tersebut selama beberapa periode ini telah membuahkan hasil yang cukup baik untuk daerah Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, ini menjadi suatu kebanggaan ketika parlemen dapat dikuasai oleh partai lokal sendiri. Kepercayaan pemilih tersebut harus dijaga dengan baik oleh pihak pengurus partai maupun kandidat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran partai lokal telah banyak sekali membantu kehidupan masyarakat Aceh Jaya. Selain daripada pendekatan yang dilakukan caleg yang selalu peduli dengan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dewan yang bertahan juga sudah terpilih pada periode sebelumnya sehingga masyarakat lebih mudah mempercayai kinerja caleg yang sudah terpilih tersebut. Dengan hadirnya caleg dari partai lokal masyarakat merasa lebih terbantu dengan hadirnya bantuan sosial yang telah banyak tersalurkan untuk masyarakat. Sehingga keinginan masyarakat jauh lebih terwujud daripada sebelum lahirnya partai lokal di Aceh. Masyarakat sekarang tidak hanya melihat partai politiknya tetapi cenderung lebih menilai kinerja caleg.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat sekaligus timses gampong Desa Pasi Timon dari caleg Partai Aceh bapak mawardi pada 01 Juli 2020 pukul 13:11 wib.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Memori kolektif masyarakat Aceh Jaya terhadap konflik sampai saat ini masih diingat oleh masyarakat. Tetapi memang konflik GAM dan RI tersebut tidak berdampak besar bagi sebagian masyarakat. Pada dasarnya Aceh Jaya merupakan salah satu daerah dari Barat Selatan yang berada diluar zona merah incaran aparat militer. Kemudian gejolak konflik di Aceh Jaya termasuk telat dirasakan sehingga mantan eks kombatan GAM saat puncak konflik di bagian Timur Aceh masih sempat menyelamatkan diri ke Hutan. Masyarakat sipil hanya perlu mewaspadaai supaya tidak dicurigai sebagai bagian dari GAM oleh aparat Negara. Jadi memori kolektif pada masa konflik tersebut memang masih diingat oleh masyarakat.
2. Adapun memori kolektif di masyarakat Aceh Jaya tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat termasuk perolehan suara partai lokal. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri tidak ingin melibatkan konflik di masalalu dengan pilihan politiknya saat ini. Bukan masyarakat ingin melupakan memori tersebut tetapi karena dinamika politik saat ini masyarakat lebih fokus melihat kearah pemimpin untuk masa depan ketimbang harus mengingat kembali konflik di masalalu tersebut. Memori kolektif ada dua yaitu memori kolektif yang dingat dan dilupakan. Dalam masyarakat Aceh Jaya cenderung kearah melupakan kolektif, artinya ada yang ketika memilih partai politik masyarakat sengaja menghilangkan

memori kolektif peristiwa konflik pada masalah seiring dengan dinamika politik sekarang ini .Oleh sebab itu, masyarakat tidak terlalu melihat kearah partai lokal tetapi lebih melihat kepada figur caleg dan bantuan sosial.

## 5.2 Saran

1. Secara umum masyarakat yang kurang pengetahuan terkait partai lokal lebih mengetahui kembali bagaimana kaitannya konflik antara GAM vs RI tersebut dengan hadirnya partai lokal. Memori kolektif tentang konflik tersebut perlu untuk diingat oleh masyarakat Aceh walaupun tidak mendapatkan dampak langsung dari kekerasan konflik. Bahkan masyarakat bisa membagikan ingatannya tersebut kepada generasi supaya memori kolektif itu tetap terjaga dan tidak terlupakan seiring dengan dinamika politik saat ini.
2. Partai politik lokal dan calon legislatif maupun dewan yang sudah terpilih lebih memperhatikan lagi fungsi partai politik. Partai politik tidak hanya sebagai jembatan calon legislatif menuju ke parlemen tetapi juga sebagai ajang sosialisasi politik, partisipasi politik, pendidikan politik baik kepada kader maupun masyarakat. Sehingga tidak ada lagi keterbatasan komunikasi antara partai lokal dan caleg terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk partai lokal bersosialisasi juga dengan masyarakat supaya pemilih mengenal baik partai lokal di Aceh bukan hanya mengenal sosok figur calon legislatifnya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. 1998. *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Prilaku Pemilih. Jurnal Ilmu Politik Edisi No. 16*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bridget, Fowler. 2007. *The Obituary as Collective Memory*, London: Routledge.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Coser, Lewis. A. (Editor dan Penerjemah), dalam: Halbwachs, Maurice, *On Collective Memory*, Chicago, 1992, The University of Chicago Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dhohri, Taufiq Rahman, Dkk. “*Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*”, Cet: Kedua (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Kavanagh, Denis.1983. *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Surbakti. Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan R Dan D*. Cet. Ke 8. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan R Dan D*. Bandung: Alfabeta.

### Daftar Rujukan Skripsi

- Ardayanti, Rosi. 2016. “*Dinamika Politik Partai Lokal di Kabupaten Aceh Jaya (Studi Konflik Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) pada pemilu Legislatif Tahun 2014)*,” Skripsi fakultas fisipol universitas syiah kuala Banda Aceh.
- Syamsyudin, 2016, “*Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Aceh Timur*,” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Putriasafa, Novella. 2016. *Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015 (Studi Di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung)* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

### Daftar Rujukan E-Jurnal

M. Afrillyan Dwi Syahputra dan Nabillah Mahdiana. 2019. *Analisis Buku Teks Sejarah terkait Materi Nasionalisme Dengan Pendekatan Teori Nasionalisme Benedict Anderson. Jurnal Historika* Vol. 22 No. 2 Oktober 2019. Program Studi S2 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

Halbwachs, Maurice. *The Collective Memory*, in: *The Collective Memory Reader*, Olick, Jeffrey, et.al., Oxford, 2011, Oxford University Press, 139-149. Teks asli: Halbwachs, Maurice: *The Collective Memory*, Terjemahan oleh Francis J. Ditter Jr. dan Vida Yazdi Ditter, New York, 1980.

Minarova-Banjac, C. 2018. *Collective Memory and Forgetting: A Theoretical Discussion*. ( Centre for East-West Cultural & Economic Studies; No. 16). Bond University.

Mopeng, Dwidyawati Esther. 2015. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)* Jurnal Politico Vol 4, No 2.

Prasetya, Agus, 2018. *Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Madiun*, Jurnal Pamator, Volume 11, No. 2, Oktober 2018 ISSN: 1829-7935

Rachmat. H. Basuki Dan Esther, 2016. *Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, lol XLII No. 2, Tahun 2016

Sari, Cut Maya Aprita. 2018. *The Imagined Community Of Indonesia: Pertentangan Nasionalisme Indonesia Vs Etnonasionalisme Bangsa Aceh Dalam Gerakan Aceh Merdeka (Gam)*. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*. Vol. 3, No. 2, April 2018. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala. P-ISSN: 2476-9029, E-ISSN: 2549-6921.

Utomo, Wildan Sena. 2014. *Nasionalisme Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dokker 1912-1914*. Lembaran Sejarah, Vol.11, No.1, April 2014. Mahasiswa S2 Jurusan Program Cosmopolis, Leiden.

Wattimena, A Reza. 2016. *Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs, Jan Assmann dan Aleida Assmann dalam Konteks Peristiwa 65 di Indonesia*, Jurnal Studia Philosophica Et Theologica. Vol. 16 No. 2 Oktober 2016 ISSN 1412-0674.

#### **Daftar Rujukan Media Online**

<https://www.kba.one/news/18-tahun-aceh-jaya-melintas-batas-darurat-militer-dan-darurat-corona/index.htm> diakses pada Juli 2020 pukul 14:14 wib.

<https://www.acehtrend.com/2017/07/19/partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:20

<https://m.merdeka.com/partai-nasional-aceh/profil/> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:30 wib

<https://www.acehtrend.com/2017/06/17/pda-partai-santri-yang-kurang-diminati/> diakses pada 17 Juli 2020 pukul 12:48 wib

<https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK264THN2018>. Diakses pada 18 Juli 2020 pukul 08:30 Wib.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/16/empat-partai-lokal-kembali-ikut-pemilu-ini-sejarah-timbul-tenggelam-parlok-di-aceh> diakses pada 24 februari 2020 pukul 20:16 wib.

<http://www.acehjayakab.go.id/>

<https://news.detik.com/parpol/d-1059309/partai-aceh-39> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 10:16 wib.

#### **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

SK Kementerian Hukum dan HAM. Portal Pemilu dan Pileg Komisi Pemilihan Umum. 18 Juli 2017.

SK Kementerian Hukum dan HAM. Portal Pemilu dan Pileg Komisi Pemilihan Umum. 14 Desember 2016.

## DAFTAR LAMPIRAN

### INSTRUMENT PENELITIAN

Pertanyaan wawancara untuk masyarakat:

1. Apakah saudara ikut berpartisipasi pada pemilu 2019?
2. Bagaimana pemikiran saudara terhadap caleg parlok yang sudah terpilih pada pemilu 2019?
3. Apakah caleg tersebut sudah memenuhi kriteria pilihan saudara?
4. Apakah ada dampak yang saudara terima terhadap parlok yang terpilih?
5. Apakah semasa kampanye saudara diberikan sesuatu oleh caleg atau pihak partai?
6. Mengapa saudara tidak memilih partai nasional?
7. Bagaimana pandangan saudara terhadap partai lokal?
8. Apakah saudara mengetahui atas dasar apa partai lokal bisa ada di Aceh?
9. Apakah saudara memiliki niat untuk berpindah ke partai nasional untuk pemilu kedepan?
10. Apakah saudara merasa puas terhadap kinerja partai lokal yang saudara pilih?
11. Apa harapan saudara dengan memilih partai politik lokal?

Pertanyaan wawancara untuk pengurus partai lokal :

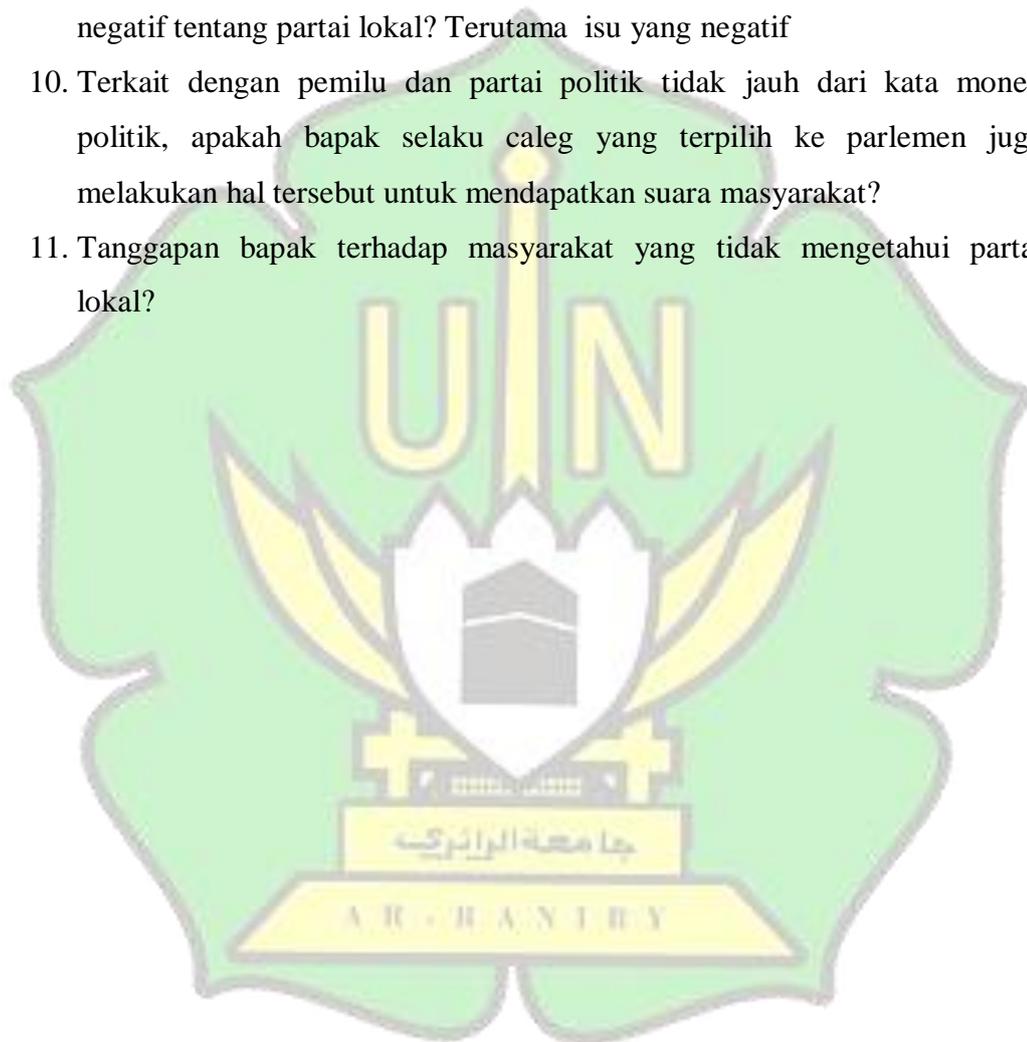
1. Bagaimana pendapat saudara tentang partai lokal (umum)?
2. Apa alasan saudara menjadi seorang pengurus dari partai lokal? kenapa saudara tidak memilih menjadi pengurus partai nasional?
3. Kenapa bapak merasa yakin bahwa caleg dari partai lokal akan terpilih ke parlemen?
4. Bagaimana strategi saudara untuk memenangkan caleg dari partai lokal pada pemilu 2019?
5. Apakah terdapat strategi khusus dari pihak partai, sehingga membedakan dari strategi partai yang lain pada pemilu 2019 ?

6. Adakah kendala yang saudara hadapi selama menjadi pengurus partai lokal? Dan bagaimana kendala dengan pemilu 2019?
7. Sebuah komunitas sudah pasti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk negaranya. Bagaimana bentuk nasionalisme yang dibangun oleh partai?
8. bagaimana pandangan bapak terhadap kesadaran nasional yang dibangun oleh parlok? Apakah sudah cukup baik untuk masyarakat?
9. Terkait isu politik, apakah isu yang digunakan oleh parlok untuk mendulang suara pemilih pada pemilu 2019?
10. Terkait pola kampanye, apakah pihak partai melakukan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat?
11. Terkait money politik. Bagaimana pandangan pihak pengurus parlok terhadap money politik pada pemilu? Apakah ikut mendukung kegiatan tersebut?
12. Bagaimana partai mengatasi pespektif masyarakat baik yang positif atau negatif tentang partai lokal?
13. Bagaimana tanggapan bapak terhadap masyarakat yang tidak mengetahui partai lokal?

Pertanyaan wawancara untuk Dewan partai lokal yang terpilih:

1. Bagaimana pendapat bapak tentang partai lokal (umum)?
2. Mengapa bapak memilih partai lokal sebagai jalan bapak menuju ke parlemen?
3. Bagaimana strategi bapak dalam memenangkan pemilu legislatif DPRK 2019?
4. Apa yang membedakan strategi pada pemilu sebelumnya dan pada pemilu 2019?
5. Bagaimana pola kampanye yang bapak gunakan pada pemilu 2019? Apakah ada sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat?
6. Adakah kendala yang bapak hadapi selama menjadi bagian partai lokal? Dan bagaimana kendala dengan pemilu 2019?

7. Sebuah komunitas sudah pasti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk negaranya. Bagaimana bentuk nasionalisme yang dibangun oleh partai?
8. Terkait isu politik, apakah isu yang digunakan oleh parlok untuk mendulang suara pemilih pada pemilu 2019?
9. Bagaimana partai mengatasi pespektif masyarakat baik yang positif atau negatif tentang partai lokal? Terutama isu yang negatif
10. Terkait dengan pemilu dan partai politik tidak jauh dari kata money politik, apakah bapak selaku caleg yang terpilih ke parlemen juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan suara masyarakat?
11. Tanggapan bapak terhadap masyarakat yang tidak mengetahui partai lokal?



## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1075/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Partai
2. masyarakat
3. akademisi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MONA HESTIKA / 160801046**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik  
Alamat sekarang : Teunom, Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Imajinasi Masyarakat dan Perolehan Suara Parlok pada Pemilu DPRK Aceh Jaya 2019*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Desember  
2020

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

### PROFIL INFORMAN

No	Nama	Profesi	Alamat	Umur
1	Muhammad Qadar	Pengurus Harian DPW PNA Aceh Jaya	Teunom	
2	Nasri Saputra	Sekretaris Umum DPW PDA Aceh Jaya	Pasi Raya	
3	Tarmizi	Pengurus Harian DPW PA Aceh Jaya	Teunom	50
4	Teungku Rasyidin	Ketua DPC PA Teunom	Teunom	
5	Mawardi Wahed	Anggota DPRK Aceh Jaya Fraksi PA	Pasi Raya	
6	Irwanto.NP	Anggota DPRK Aceh Jaya Fraksi PNA	Teunom	

7	H. Dasril A Rahman.IB	Anggota DPRK Aceh Jaya Fraksi PDA	Teunom	
8	Mawardi	Timses PA	Teunom	42
9	Andi Ikhsan	Timses PNA	Teunom	27
10	Pardi	Petani	Teunom	35
11	Andian Ys.	Pedagang	Teunom	50
12	Rahimudin	Pedagang	Teunom	50
13	Hermadi	Guru	Teunom	34
14	Nova Aulia	Mahasiswa	Teunom	23
15	Darmawi	Petani	Teunom	55
16	Saed Abdillah	Petani	Teunom	48
17	Mariani	Petani	Teunom	55
18	Umar Dani	Pedagang	Teunom	42
19	Tgk Rusli	Petani	Teunom	54
20	Misbah	Pegawai Kontrak	Teunom	30
21	Jamaluddin	Petani	Teunom	40
22	Liza	Guru	Teunom	37
23	Hj. Rukani	Pedagang	Teunom	58
24	Jufriani	Petani	Teunom	40

25	Tgk Bakri	Petani	Teunom	50
26	Hj. Aida	Pedagang	Teunom	44
27	Hj. Zainab	Pedagang	Teunom	47
28	Henni Kimalis	Petani	Teunom	37
29	Saed Humairi	Petani	Teunom	34



## DOKUMENTASI WAWANCARA

### Wawancara dengan pengurus dan timses partai lokal

1. Wawancara dengan pengurus harian DPW PNA Aceh Jaya Bapak Muhammad Qadar pada 27 Juni 2020



2. Wawancara dengan Sekretaris Umum DPW PDA Aceh Jaya Bapak Nasri Saputra pada 04 Juli 2020



3. Wawancara dengan pengurus harian DPW PA Aceh Jaya Bapak Tarmizi pada 30 Juni 2020



4. Wawancara dengan ketua DPC PA teunom Tengku Rasyidin pada 29 Juni 2020



5. Wawancara dengan Timses Gampong Partai Aceh Bapak Mawardi



6. Wawancara dengan Timses Kecamatan PNA Bapak Andi Ikhsan pada 08 Juli 2020



## Wawancara Dewan Partai Lokal Dapil 2 Aceh Jaya

7. Wawancara dengan Dewan Fraksi Partai Aceh Bapak Mawardi Wahed pada 01 Juli 2020



8. Wawancara dengan Dewan Fraksi PNA Bapak Irwanto.NP pada 03 Juli 2020



9. Wawancara dengan Dewan Fraksi PDA Bapak H. Dasril A Rahman.IB pada 03 Juli 2020



**Wawancara dengan masyarakat pemilih parlok**

10. Wawancara dengan Bapak Pardi Masyarakat Desa Teupin Ara pada 29 Juni 2020



11. Wawancara dengan Bapak Rahimudin Masyarakat Desa Teupin Ara pada 29 Juni 2020



12. Wawancara dengan Bapak Andian. YS Masyarakat Desa Teupin Ara pada 29 Juni 2020



13. Wawancara dengan Bapak Tgk.Bakri masyarakat desa Pasi Geulima pada 03 Juli 2020



14. Wawancara dengan bapak Jamaluddin masyarakat desa Pasi Geulima pada 02 Juli 2020



15. Wawancara dengan bapak Saed Humairi masyarakat Desa Pasi Geulima pada 03 Juli 2020



16. Wawancara dengan Bapak Tgk Rusli Masyarakat desa Pasi Timon pada 01 Juli 2020



17. Wawancara dengan Bapak Misbah Masyarakat Desa Pasi Timon pada 01 Juli 2020



18. Wawancara dengan Bapak Saed Abdillah masyarakat desa Teupin Ara pada 30 Juni 2020



19. Wawancara dengan bapak Hermadi masyarakat desa Teupin Ara pada 29 Juni 2020



20. Wawancara dengan Bapak Darmawi Masyarakat desa Pasi Geulima pada tanggal 30 Juni 2020



21. Wawancara dengan Bapak Umar Dani masyarakat desa Gampong Baro pada 01 Juli 2020



22. Wawancara Nova Aulia masyarakat desa Pasi Geulima pada 30 Juni 2020



23. Wawancara dengan Ibu Mariani masyarakat desa Padang Kleng pada 30 Juli 2020



24. Wawancara dengan ibu Hj. Rukani masyarakat desa Gampong Baro pada 03 Juli 2020



25. Wawancara dengan Ibu Jufriani masyarakat desa Teupin Asan pada 03 Juli 2020



26. Wawancara dengan ibu Hj. Aida masyarakat desa Cottrap pada 03 Juli 2020



27. Wawancara dengan ibu Hj. Zainab masyarakat desa Pantan pada 03 Juli 2020



28. Wawancara dengan Ibu Henni Kimalis masyarakat desa Teupin Asan pada 03 Juli 2020

